



**BUKU REFERENSI** **EKONOMI**  
**PEMBANGUNAN**

**Penulis :**

**Nurhayati**

**Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M**

**Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc**

**Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E**

**Sri Yani Kusumaštuti**

**SONPEDIA.COM**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

# BUKU REFERENSI EKONOMI PEMBANGUNAN

**Penulis :**

Nurhayati

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc

Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E

Sri Yani Kusumastuti

**Penerbit:**

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

# **BUKU REFERENSI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**Penulis :**

Nurhayati

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc

Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E

Sri Yani Kusumastuti

**ISBN : 978-623-514-370-5**

**Editor :**

Yayan Agusdi

**Penyunting :**

Nurma Yunita

**Desain sampul dan Tata Letak :**

Efitra

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

**Anggota IKAPI : 006/JBI/2023**

Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "***BUKU REFERENSI EKONOMI PEMBANGUNAN***" dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku ini adalah salah satu buku referensi yang membahas konsep, tantangan, serta strategi dalam pembangunan ekonomi secara sistematis. Dimulai dengan Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan yang mencakup definisi, ruang lingkup, serta teori pertumbuhan ekonomi sebagai landasan utama. Buku ini kemudian mengupas Faktor-Faktor Penentu Pembangunan Ekonomi, seperti peran sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, serta teknologi dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, buku ini menyoroti Masalah dan Tantangan Pembangunan Ekonomi, termasuk kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta permasalahan sektor pertanian dan industrialisasi. Sebagai solusi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi dibahas melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan pembangunan infrastruktur. Bab terakhir mengeksplorasi Prospek Pembangunan di Era Modern, dengan fokus pada globalisasi, digitalisasi, dan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Buku ini menjadi referensi ideal bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi ekonomi untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi secara komprehensif.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2024  
Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN .....</b>	<b>1</b>
A.    DEFINISI DAN TUJUAN EKONOMI PEMBANGUN .....	2
B.    RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN EKONOMI PEMBANGUNAN .....	6
C.    TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	12
<b>BAB 2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>24</b>
A.    SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
B.    INVESTASI DAN MODAL FISIK .....	34
C.    TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN .....	51
<b>BAB 3 MASALAH DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>57</b>
A.    KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN .....	57
B.    PENGANGGURAN DAN KETERBATASAN LAPANGAN KERJA .....	67
C.    MASALAH SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI .....	81
<b>BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>93</b>
A.    KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEMBANGUNAN .....	93
B.    PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI ASING .....	119
C.    PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN URBANISASI .....	131
<b>BAB 5 PROSPEK PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA MODERN.....</b>	<b>140</b>
A.    DAMPAK GLOBALISASI DAN INTEGRASI EKONOMI .....	142

B. DIGITALISASI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 .....	160
C. TRANSFORMASI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>167</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>180</b>

## BAB 1

# KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN

Mengupayakan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan pada suatu negara. Salah satu aspek yang dapat dan harus dicapai dalam upaya menyejahterakan masyarakat adalah dengan memastikan perekonomian masyarakat yang berkecukupan. Maka dari itulah, ekonomi pembangunan menjadi cabang ilmu ekonomi yang penting untuk dipahami dan diterapkan.

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi dengan peran yang amat krusial dalam memahami dan menganalisis proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Pada masas globalisasi dan dinamika ekonomi seperti pada masa kini, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Kawasan. Pembangunan ekonomi memiliki konsep yang lebih luas dan mencakup berbagai faktor-faktor di luar kuantitas ekonomi.

Wibowo (2023) berpendapat bahwa ekonomi pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa keberlangsungan pembangunan ekonomi melibatkan berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar ekonomi pembangunan menjadi fondasi yang sangat kokoh apabila suatu negara hendak

merancang kebijakan yang memungkinkan terdorongnya kemajuan berkelanjutan yang inklusif.

Bab ini akan membahas konsep-konsep mendasar dalam ekonomi pembangunan. Bab ini akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, ruang lingkup, serta berbagai teori yang melandasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan kita dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis tantangan dan peluang pembangunan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Pembahasan ini juga diharapkan akan mampu memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dan akan diterapkan.

## **A. DEFINISI DAN TUJUAN EKONOMI PEMBANGUN**

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari proses transformasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan di negara-negara berkembang (Todaro & Smith, 2006). Tujuan ilmu ekonomi pembangunan adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Konsep ini melibatkan lebih dari sekadar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu dengan melibatkan pula perbaikan kualitas hidup melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam pandangan Wibowo (2023) yang turut menyetujui penelitian dari Todaro dan Smith, menekankan bahwa pembangunan tidak hanya

bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang signifikan.

Konsep besar ekonomi pembangunan juga turut direalisasikan dalam pembangunan ekonomi. Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pemerataan kesempatan dan kebebasan. Sementara itu, Amartya Sen (dalam Hasan et al., 2022) berpendapat bahwa pembangunan adalah upaya memperluas kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan politik, sosial, dan ekonomi. Amartya Sen menyatakan bahwa pembangunan tidaklah hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, akan tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan individu. Lewis (1955) turut menambahkan pendapat yang mendukung Amartya Sen dengan menyoroti pentingnya transformasi ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Lewis percaya bahwa industrialisasi hingga masa yang akan datang akan dianggap sebagai motor utama pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang.

Perbedaan mendasar antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering menjadi pembahasan dalam berbagai kajian, penelitian, dan tulisan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional atau PDB secara kuantitatif. Sementara itu, pembangunan ekonomi turut mencakup aspek kualitatif yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Wibowo (2023) menyatakan dalam tulisannya bahwa pertumbuhan ekonomi

bisa saja tidak diiringi oleh pembangunan jika tidak terjadi pemerataan dan perbaikan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lebih menekankan transformasi struktural dan distribusi yang adil, tidak hanya sekadar akumulasi kekayaan nasional.

Tujuan utama pembangunan ekonomi mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan pendapatan. Menurut Todaro dan Smith (2006), pembangunan harus memberikan dampak bagi seluruh elemen masyarakat. Pembangunan harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan ini dapat terimplementasi melalui program-program seperti meningkatkan investasi pada layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hasan et al. (2022) juga turut menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Hal inilah yang membuktikan bahwa masyarakat juga turut memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam perekonomian dan memperbaiki taraf hidup bersama.

Sama halnya dengan kebanyakan negara, pembangunan ekonomi menghadapi berbagai tantangan dan peluang di Indonesia. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Namun Wibowo (2023) memperhatikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan diperlukannya pendekatan pembangunan yang

lebih merata dan inklusif. Pendekatan pembangunan harus memperhatikan faktor eksternal seperti aspek sosial dan kebudayaan masyarakat, selain dari fokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Apabila kita melihat pembangunan ekonomi di Negara Bangladesh, negara tersebut telah berhasil membuktikan perkembangan pada pembangunan ekonomi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui program mikrofinansial seperti *Grameen Bank*. Program ini mampu meningkatkan pemerataan disebabkan oleh pendekatan pembangunannya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Lewis (1955) yang menekankan bahwa pembangunan yang efektif memerlukan transformasi struktural, yaitu ketika sektor tradisional beralih menjadi sektor modern yang lebih produktif. Kasus Bangladesh membuktikan bahwa pendekatan ini tidak selalu harus berfokus pada industrialisasi besar-besaran, melainkan dapat dimulai dari penguatan ekonomi lokal dan usaha kecil.

Pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Todaro dan Smith (2006) menyoroti bahwa pembangunan yang sukses tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di tengah tantangan perubahan iklim yang sangat ekstrem secara global, kebijakan pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini perlu ditekankan agar generasi mendatang dapat menikmati keberadaan sumber daya alam yang dapat terjaga mulai dari masa kini. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan

kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Dengan memahami berbagai konsep dan tujuan ekonomi pembangunan, dapat terlihat bahwa proses ini melibatkan transformasi yang kompleks serta berkelanjutan. Pandangan para ahli seperti Todaro, Sen, dan Lewis memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bahwa pembangunan tidak hanya terbatas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi turut terikat dengan upaya menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus dirancang secara seksama dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Ruang lingkup ekonomi pembangunan mencakup berbagai aspek yang lebih luas dibandingkan dengan analisis pertumbuhan ekonomi semata. Lewis (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan *output* nasional yang diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pembangunan ekonomi melibatkan transformasi struktural yang lebih mendalam. Pembangunan ekonomi turut menyertakan berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat secara kualitatif, seperti perubahan institusional, sosial, dan politik.

Todaro dan Smith (2006) turut memberikan persetujuan dengan pendapat Lewis, pendapat bahwa pembangunan tidak hanya mencerminkan peningkatan pendapatan. Todaro dan Smith percaya bahwa pembangunan ekonomi turut memperbaiki kualitas hidup dan distribusi pada masyarakat secara lebih adil. Oleh karena itu, ruang lingkup ekonomi pembangunan mencakup analisis mengenai upaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam analisis pembangunan ekonomi, berbagai faktor saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan proses pembangunan. Menurut Subandi (2019), terdapat empat faktor utama yang memengaruhi pembangunan yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Faktor ekonomi melibatkan investasi, pertumbuhan industri, dan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, faktor sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender pada masyarakat. Faktor politik berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, kebijakan publik yang efektif, dan pemberantasan korupsi. Faktor lingkungan kini menjadi semakin krusial dengan adanya tantangan perubahan iklim yang ekstrem, yang dialami oleh kawasan-kawasan di berbagai belahan dunia.

Hasan et al. (2022) turut berpendapat bahwa integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan harus difokuskan. Hal ini menjadi amat krusial dikarenakan pembangunan ekonomi yang harus mencakup berbagai komplemen penting untuk seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada suatu negara tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, melainkan

manfaat dalam jangka waktu yang panjang dan bahkan diharapkan berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan persiapan pembangunan ekonomi yang matang agar kelak dapat berdampak positif bagi generasi mendatang.

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah *Human Development Index* (HDI), atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran pada IPM dilakukan dengan menggabungkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Todaro dan Smith (2006) menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan inti dari proses pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh tujuan dari pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi dan menikmati manfaat pembangunan. Pangestuty dan Prasetyia (2021) turut memberikan pendapat mereka bahwa IPM tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi yang efektif harus berorientasi pada peningkatan IPM, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang bersifat kuantitatif.

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sangatlah erat. Pembangunan ekonomi tidak mungkin dapat terjadi apabila tidak terdapat kemajuan pada sumber daya manusia, dan begitu pula sebaliknya. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memberikan sumber daya yang diperlukan pada berbagai sektor. Sebagai contoh, pembangunan yang berkelanjutan akan membantu

meningkatkan sumber daya manusia yang bergerak pada bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Kemajuan sumber daya manusia pada sektor-sektor krusial ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, investasi dalam pembangunan manusia akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Contoh penerapan investasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat ini adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan fokus utama pada sektor-sektor krusial ini juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat bergerak secara berkelanjutan. Ketimpangan sosial yang belum terselesaikan akan terus menjadi penghambat dalam upaya pembangunan ekonomi suatu negara (Subandi, 2019).

Integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di Indonesia menjadi prioritas yang utama. Pemerintah perlu meneliti dan mengimplementasikan program-program yang mendukung pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia secara berkesinambungan. Pemerintah perlu fokus pada pengimplementasian program-program peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat. Bantuan pada akses-akses ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat IPM Indonesia secara keseluruhan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta, perlu dipastikan pula bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Cakupan ekonomi pembangunan melibatkan berbagai pendekatan dalam mengukur kemajuan suatu negara. Indikator-indikator yang sering dijadikan acuan utama adalah indikator ekonomi dan indikator kesejahteraan sosial. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) sering digunakan untuk menilai tingkat produksi dan pendapatan nasional. Namun, Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa indikator-indikator ini hanya memberikan gambaran parsial tentang pembangunan. Hal ini dikarenakan bahwa PDB dan PNB tidak mempertimbangkan aspek distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang lebih merujuk pada aspek sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Index of Sustainable Economic Welfare* (ISEW), atau yang dikenal sebagai Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan untuk menilai kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan. Hasan et al. (2022) turut menyatakan persetujuan dalam pendapat tersebut dengan menekankan bahwa kombinasi antara indikator kuantitatif dan kualitatif sangat penting untuk memahami dinamika pembangunan secara menyeluruh.

Lembaga-lembaga berkepentingan memainkan peran kunci dalam proses pembangunan ekonomi. Lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi

dalam proses pembangunan. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan mengatasi ketimpangan sosial. Kebijakan publik yang efektif sangat krusial dalam mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas (Lewis, 1955). Di sisi lain, sektor swasta menjadi motor penggerak inovasi dan pencipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat turut mengambil peranan aktif dalam pembangunan. Juliana et al. (2023) menyoroti peran masyarakat sipil dalam memastikan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pembangunan, terutama dalam konteks demokratisasi. Kolaborasi antara ketiga lembaga ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan inklusifitas.

Seperti yang telah disebutkan, isu-isu global seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menyoroti bahwa kemiskinan tidak hanya mempermasalahakan pendapatan masyarakat yang rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pada sisi lain, kesetaraan gender juga menjadi fokus yang sangat penting pada masa ini. Di Indonesia, masih sering terjadi diskriminasi gender yang dapat menghambat potensi pembangunan negara. Pada sisi pendidikan dan kesehatan, Tambunan (2011) menyatakan dalam bukunya bahwa investasi dalam kedua sektor tersebut adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus

mencakup kebijakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan sosial dan pengurangan ketimpangan.

Perbandingan dalam pendekatan pembangunan di antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Negara maju cenderung memiliki infrastruktur yang kuat, sistem pendidikan berkualitas, dan stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan antar daerah dan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Juliana et al., 2023). Hasan et al. (2022) mencatat bahwa negara berkembang membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kapasitas sosial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi masing-masing negara.

### **C. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Para peneliti dan ahli ekonomi telah menciptakan berbagai teori mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang beragam. Teori-teori tersebut didasarkan atas perkembangan ekonomi yang telah terjadi pada masyarakat. Tidak terlepas pula, teori-teori tersebut dicetuskan dengan berbagai faktor yang pada mulanya tidak dinilai sebagai indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi pada masyarakat. Namun seiring

dengan perkembangan zaman, berbagai faktor eksternal turut mempengaruhi teori-teori yang terus berkembang. Pada bagian ini akan dibahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi modern, dan teori pembangunan ekonomi dari berbagai ahli ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menjadi fondasi utama dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi. Adam Smith dalam karyanya "*The Wealth of Nations*", memperkenalkan konsep spesialisasi dan pembagian kerja sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith, spesialisasi memungkinkan individu dan perusahaan untuk fokus pada aktivitas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan pada masyarakat.

Dengan adanya pembagian kerja, proses produksi menjadi lebih efektif. Setiap pekerja memiliki tugas spesifik yang dikuasai dengan baik. Hal ini yang mendukung kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif. Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa prinsip ini tidak hanya berlaku pada perusahaan dengan tingkat mikro, tetapi juga pada skala makro dalam perdagangan antar negara. Setiap negara dapat memaksimalkan keunggulan masing-masing melalui spesialisasi produksi yang menguntungkan.

Teori klasik lainnya yang sangat berpengaruh adalah konsep keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam pandangannya, setiap negara harus memproduksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain

meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan komparatif memungkinkan terjadinya perdagangan internasional yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi global, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasan et al. (2022) menggarisbawahi bahwa teori David Ricardo menjadi dasar dari perdagangan bebas dan globalisasi. Praktik teori ini terjadi dengan masing-masing negara yang berfokus pada produksi barang dengan keuntungan yang relatif paling besar. Konsep ini juga menunjukkan pentingnya alokasi sumber daya yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan.

Implementasi teori Adam Smith dan David Ricardo dalam konteks pembangunan modern masih relevan hingga saat ini. Subandi (2019) menjelaskan bahwa prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif tidak hanya berlaku pada perdagangan antar negara maju, tetapi juga menjadi strategi penting bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian atau industri berbasis sumber daya alam, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan utama yang dihadapi dengan praktik komparatif ini adalah bagaimana negara-negara berkembang dapat meningkatkan daya saing melalui investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Tanpa penguatan kapasitas internal, keunggulan komparatif dapat menjadi bumerang yang justru memperkuat ketergantungan pada negara-negara maju.

Meskipun teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik memberikan landasan penting, terdapat pula kelemahan pada asumsi-asumsi yang

digunakan. Wibowo (2023) menyoroti bahwa teori klasik cenderung mengabaikan aspek distribusi pendapatan dan dampak sosial dari spesialisasi. Dalam praktiknya, spesialisasi yang berlebihan dapat menciptakan ketimpangan dan ketergantungan pada sektor tertentu. Oleh karena itu, teori pertumbuhan modern menekankan perlunya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor strategis. Selain itu, keunggulan komparatif tidak selalu berjalan mulus dalam sistem perdagangan global yang penuh dengan hambatan tarif dan non-tarif.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, penerapan teori pertumbuhan ekonomi klasik menghadapi tantangan dan peluang tersendiri. Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa negara berkembang harus berhati-hati dalam menentukan sektor mana yang akan dijadikan prioritas spesialisasi. Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan sumber daya alam. Namun dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan, diperlukan transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi. Hasan et al. (2022) menambahkan bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan keunggulan komparatif, sekaligus mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada teori pertumbuhan ekonomi modern, terdapat dua teori yang sering menjadi sorotan dalam masa pembangunan ekonomi. Teori-teori modern tersebut adalah Teori Harrod-Domar dan Solow. Kedua teori ini sangat memperhatikan aspek-aspek baru yang amat penting pada masa pertumbuhan ekonomi modern, seperti pentingnya keberadaan investasi dan model pertumbuhan ekonomi neoklasik.

Berikut ini akan dibahas mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi modern yang berbasis pada Teori Harrod-Domar dan Teori Solow.

Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi investasi dalam memproduksi *output* baru. Menurut Todaro dan Smith (2006), model ini menyoroti hubungan langsung antara akumulasi modal dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan asumsi bahwa peningkatan investasi akan mendorong kapasitas produksi. Namun, teori ini juga menegaskan adanya potensi ketidakseimbangan antara tabungan dan investasi. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat pertumbuhan jika tidak diatasi dengan kebijakan ekonomi yang tepat.

Selanjutnya pada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik milik Solow, telah terjadi pengembangan konsep dari teori Harrod-Domar dengan menyertakan peranan teknologi sebagai faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Hasan et al. (2022) menginterpretasikan teori Solow sebagai teori yang memperkenalkan Konsep *Steady-State*, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai titik jenuh tanpa adanya inovasi teknologi. Implikasi dari teori ini adalah pentingnya peningkatan produktivitas melalui inovasi dan pendidikan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Model pertumbuhan endogen muncul sebagai jawaban terhadap keterbatasan model neoklasik yang menganggap teknologi sebagai faktor eksternal. Model ini menempatkan inovasi dan kemajuan teknologi sebagai hasil dari investasi pada sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan atau disebut sebagai *Research and Development* (R&D). Pangestuty dan Prasetyia (2021) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, yang sangat mendukung model pertumbuhan endogen. Dengan kata lain, investasi dalam pendidikan dan infrastruktur penelitian dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari dalam sistem ekonomi itu sendiri.

Relevansi teori-teori ini di Indonesia dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendorong inovasi pada perkembangan teknologi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Juliana, Safitri, dan Fadillah (2023) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih terdapat banyak tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. Kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap sektor-sektor berbasis teknologi menjadi amat krusial dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, teori pertumbuhan ekonomi modern menawarkan pandangan yang lebih dinamis dan komprehensif tentang bagaimana suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami konsep ini, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tidak hanya

berfokus pada peningkatan investasi, tetapi juga pada pengembangan teknologi dan inovasi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi.

Teori pembangunan ekonomi merupakan kelanjutan dan penggabungan dari teori-teori pertumbuhan klasik dan modern dengan berbagai faktor lainnya yang menjadi indikator-indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam teori pembangunan ekonomi, terdapat empat topik utama yaitu teori dualisme ekonomi, teori pendekatan ketergantungan, teori pembangunan berkelanjutan, dan relevansi teori pembangunan dengan keadaan di negara-negara berkembang. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai teori pembangunan ekonomi.

Teori dualisme ekonomi yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1955) memberikan penjelasan tentang keberadaan dua sektor ekonomi yang berbeda dalam suatu negara. Kedua sektor tersebut adalah sektor tradisional dan sektor modern. Lewis menjelaskan bahwa sektor tradisional lebih didominasi pada sektor-sektor yang dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan dan kehutanan dengan produktivitas yang lebih rendah. Sementara itu, sektor modern mencakup pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti sektor industri yang memiliki produktivitas tinggi.

Proses pembangunan terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional menuju sektor modern. Perpindahan ini akan mendukung peningkatan *output* nasional yang lebih tinggi. Namun, Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa proses ini tidak selalu berjalan

mulus, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan migrasi tenaga kerja dari wilayah rural (desa) ke daerah urban (perkotaan). Namun, kegiatan ini sering tidak diiringi dengan persiapan dan peningkatan keterampilan yang memadai. Hal ini yang biasanya mengakibatkan masalah pengangguran pada berbagai sektor.

Pendekatan ketergantungan (*Dependency Theory*) memberikan perspektif yang berbeda dengan menyoroti hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan di negara berkembang terhambat akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pendekatan ini menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, terutama sumber daya alam, dieksploitasi dan dikendalikan oleh negara-negara maju untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa negara berkembang sering terjebak dalam pola perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Masih banyak negara berkembang yang mengekspor komoditas primer dengan nilai tambah rendah dan mengimpor barang-barang manufaktur berteknologi tinggi. Hal ini memperkuat ketergantungan struktural yang sulit diputus.

Todaro dan Smith menambahkan bahwa terdapat solusi yang ditawarkan oleh teori ketergantungan. Solusi-solusi tersebut mencakup reformasi struktural, penguatan industri domestik, dan pengurangan ketergantungan pada investasi asing serta teknologi dari negara maju. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut,

negara berkembang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan melalui kebijakan yang memprioritaskan kepentingan nasional.

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan buku yang ditulis oleh Tulus Tambunan. Menurut Tambunan (2011), negara berkembang sering kali berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global. Hal ini yang kemudian menyebabkan ketergantungan struktural pada ekspor komoditas primer dan impor barang manufaktur. Ketergantungan ini memperkuat ketimpangan dan memperlambat proses pembangunan.

Sahban (2018) turut menambahkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk mengatasi ketergantungan, negara berkembang perlu memperkuat kemandirian ekonomi melalui diversifikasi industri dan pengembangan kapasitas internal. Hal yang dapat dilakukan sebagai langkah awal adalah dengan melakukan investasi dalam pendidikan dan teknologi, berdasarkan kajian dan observasi akan kebutuhan dari masyarakat yang paling utama.

Selain kedua teori pembangunan di atas, teori pembangunan berkelanjutan turut menjadi teori pembangunan yang sangat penting pada masa kini. Teori pembangunan berkelanjutan menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi modern, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menciptakan masalah jangka panjang. Saat ini, degradasi sumber daya alam dan perubahan iklim sudah menjadi contoh-contoh masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat global dalam jangka waktu yang panjang. Subandi (2019) turut menyatakan pendapatnya bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang lebih seksama. Kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara berimbang. Tantangan ini terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada praktiknya, eksploitasi berlebihan dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat sering terjadi di Indonesia dan perlu dihentikan dengan segera.

Relevansi teori-teori ini dengan kondisi negara berkembang, khususnya Indonesia, sangat signifikan. Teori dualisme ekonomi menjelaskan fenomena ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pergi bekerja di kawasan urban akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tetap berada di wilayah rural. Namun, inisiatif tersebut sering kali tidak disertai dengan peningkatan kapasitas yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penyebab tersebarnya pengangguran di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan ketergantungan dapat dilihat dalam ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas seperti minyak sawit dan batu bara. Juliana, Safitri, dan Fadillah (2023) menyoroti

bahwa untuk mengatasi ketergantungan ini, Indonesia perlu mendorong industrialisasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan memperkuat sektor manufaktur. Selain itu, pembangunan berkelanjutan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Berhubungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, program perhutanan sosial dan energi terbarukan menunjukkan upaya integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan ekonomi. Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Sahban (2018) turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya kolaborasi ini, kebijakan-kebijakan yang telah dirancang tidak dapat terlaksana dengan efektif dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial.

Secara keseluruhan, integrasi teori-teori pembangunan ekonomi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tantangan dan peluang di negara berkembang. Teori dualisme ekonomi, pendekatan ketergantungan, dan konsep pembangunan berkelanjutan saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika pembangunan. Todaro dan Smith (2006) menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan angka-angka makroekonomi, tetapi juga tentang transformasi struktural dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebijakan yang memerhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan menerapkan teori-teori ini secara konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Juliana et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi bergantung pada sinergi antara berbagai indikator, termasuk kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kontribusi sektor swasta. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## BAB 2

# FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMBANGUNAN EKONOMI

### A. SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) merupakan dua faktor utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam pembangunan nasional Indonesia. SDA mengacu pada segala kekayaan alam yang tersedia di daratan, perairan, hingga bawah tanah, seperti mineral, minyak bumi, gas alam, hutan, lahan pertanian, dan hasil laut. Di sisi lain, SDM mencakup kemampuan, keahlian, dan potensi individu yang dikelola untuk memanfaatkan SDA demi kemajuan bangsa. Kombinasi optimal antara SDA yang melimpah dan pengelolaan SDM yang berkualitas menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan SDA. Wilayahnya yang luas dan strategis menjadikannya memiliki cadangan mineral, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, keberadaan SDA ini tidak otomatis membawa kemakmuran tanpa pengelolaan yang baik. SDA perlu diolah secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Pembangunan yang berbasis SDA membutuhkan inovasi teknologi serta kebijakan yang memastikan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi mendatang.

Peran SDM dalam pembangunan sangat krusial karena manusia adalah penggerak utama yang menentukan arah dan bentuk pengelolaan SDA. SDM yang terdidik dan berkompeten mampu menciptakan nilai tambah dari SDA yang tersedia. Sebagai contoh, pengolahan bahan mentah seperti minyak kelapa sawit menjadi produk olahan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk menciptakan SDM yang unggul.

Namun, salah satu tantangan besar Indonesia adalah kesenjangan kualitas SDM di berbagai wilayah. Masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan inovasi. Pemerataan kualitas SDM harus menjadi prioritas pemerintah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Hal ini juga penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan pembangunan jangka panjang. Penebangan hutan secara ilegal, pencemaran laut akibat limbah, dan eksploitasi tambang yang tidak ramah lingkungan adalah beberapa contoh ancaman yang dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tegas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan SDA dikelola secara berkelanjutan.

Keterkaitan antara SDA dan SDM juga terlihat dalam sektor energi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi

terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan energi angin. Namun, potensi ini hanya dapat dimanfaatkan jika didukung oleh SDM yang menguasai teknologi energi bersih. Peralihan ke energi terbarukan tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon global.

Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk memaksimalkan peran SDA dan SDM. Sinergi ini dapat mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital. Dengan demikian, SDA dan SDM dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal juga berperan sebagai bagian dari SDM. Pemanfaatan SDA harus sejalan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan berbasis budaya dapat membantu menjaga keharmonisan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, SDM Indonesia harus mampu bersaing di tingkat internasional. Hal ini memerlukan penguasaan teknologi, bahasa asing, dan adaptasi terhadap perubahan global. Dengan demikian, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi antara pengelolaan SDA yang bijaksana dan pemberdayaan SDM yang optimal. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan, karena SDA menyediakan bahan baku untuk pembangunan, sementara SDM adalah pengelola yang menentukan arah pemanfaatan SDA tersebut. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju yang berdaulat dan sejahtera.

Selain pengelolaan yang bijaksana, sinergi antara SDA dan SDM harus didukung dengan kebijakan pembangunan yang tepat. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa eksploitasi SDA dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Regulasi yang jelas dan pengawasan ketat terhadap aktivitas industri berbasis SDA, seperti tambang dan perkebunan, harus terus diperbaiki. Dalam hal ini, SDM dengan kompetensi tinggi di bidang hukum, tata kelola lingkungan, dan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adil.

Peran teknologi juga tidak bisa diabaikan dalam mengoptimalkan SDA dan SDM. Dengan adopsi teknologi modern, pemanfaatan SDA dapat dilakukan secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, teknologi drone dan citra satelit dapat digunakan untuk memantau aktivitas deforestasi dan mendeteksi area pertambangan ilegal. Namun, penerapan teknologi ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh SDM yang terampil dan mampu mengoperasikannya. Oleh karena itu, peningkatan literasi teknologi harus menjadi prioritas dalam pengembangan SDM Indonesia.

Dalam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat pedesaan, optimalisasi SDA dan SDM juga sangat penting. Indonesia memiliki lahan subur dan iklim tropis yang mendukung keberagaman produk pertanian. Namun, banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional dengan produktivitas rendah. Dengan mendukung petani melalui pelatihan, akses terhadap teknologi pertanian modern, dan bantuan keuangan, potensi sektor pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, sektor pariwisata adalah contoh lain dari pengelolaan SDA yang memerlukan peran aktif SDM. Keindahan alam Indonesia, seperti pantai, pegunungan, dan hutan tropis, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan internasional. Namun, pengelolaan yang buruk dapat merusak ekosistem dan mengurangi daya tarik wisata. SDM yang kompeten di sektor pariwisata dapat mengembangkan layanan yang profesional, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memastikan kelestarian lingkungan.

Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) adalah dua faktor utama yang saling mendukung dalam pembangunan nasional. Berikut ini penjelasan mendetail tentang peran masing-masing:

### **1. Sumber Daya Alam (SDA)**

Sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA mencakup bahan tambang, tanah, air, hutan, energi,

dan keanekaragaman hayati. Peran SDA dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

**a. Sebagai Sumber Pendapatan Negara**

Sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan hasil tambang lainnya, menjadi komoditas ekspor yang dapat menghasilkan devisa. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

**b. Menyediakan Bahan Baku untuk Industri**

Bahan mentah dari SDA menjadi dasar bagi sektor industri, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Misalnya, hasil pertanian digunakan untuk pangan dan tekstil, sedangkan hasil tambang untuk industri manufaktur dan energi.

**c. Mendukung Ketahanan Energi**

Energi yang berasal dari SDA, seperti minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan (matahari, angin, air), sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ketahanan energi menjadi fondasi stabilitas ekonomi dan sosial.

**d. Menyediakan Lapangan Kerja**

Eksplorasi dan pemanfaatan SDA menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung (pekerjaan di sektor tambang dan kehutanan) maupun tidak langsung (sektor jasa dan perdagangan yang terkait).

**e. Fondasi Pembangunan Berkelanjutan**

Pengelolaan SDA yang bijaksana dapat memastikan keberlanjutan pembangunan. Misalnya, konservasi hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati akan mendukung keseimbangan ekosistem.

**f. Menunjang Kedaulatan Negara**

Pemanfaatan SDA secara mandiri dapat memperkuat posisi strategis suatu negara di kancah global. Negara yang kaya SDA memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi, pangan, dan bahan baku.

**g. Menjadi Faktor Daya Saing Global**

SDA yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan daya saing negara dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, negara yang mampu mengolah hasil tambang menjadi produk bernilai tinggi akan lebih kompetitif dibandingkan yang hanya mengekspor bahan mentah.

**h. Mendukung Pariwisata dan Budaya**

SDA juga menjadi daya tarik pariwisata, seperti pantai, gunung, dan taman nasional. Keanekaragaman hayati dan keindahan alam memberikan kontribusi besar terhadap sektor pariwisata, yang pada akhirnya mendukung pendapatan negara dan masyarakat lokal.

**i. Sumber Penelitian dan Inovasi**

SDA menjadi objek penelitian yang mendorong inovasi di berbagai bidang, seperti teknologi energi terbarukan,

bioteknologi, dan pengembangan bahan baru. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

**j. Penyangga Stabilitas Lingkungan**

SDA seperti hutan, lahan gambut, dan sungai berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem. Pengelolaan yang baik mendukung mitigasi perubahan iklim, pengendalian bencana, dan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

**2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia mencakup penduduk yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas untuk berkontribusi dalam pembangunan. SDM merupakan penggerak utama yang memanfaatkan SDA. Peran SDM dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

**a. Sebagai Inovator dan Pengelola SDA**

SDM yang berkualitas mampu mengelola SDA secara efisien dan bertanggung jawab, menghindari eksploitasi berlebihan, dan menciptakan nilai tambah melalui teknologi dan inovasi.

**b. Penggerak Ekonomi**

Tenaga kerja yang produktif meningkatkan output nasional. Mereka terlibat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan jasa, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

**c. Penyedia Teknologi dan Keahlian**

Penguasaan teknologi oleh SDM memungkinkan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing bangsa. Contohnya adalah penggunaan teknologi modern dalam pertanian dan manufaktur.

**d. Pencipta Kebijakan Pembangunan**

Pemimpin dan pembuat kebijakan yang kompeten menentukan arah pembangunan nasional. Mereka mengatur bagaimana SDA dan SDM dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

**e. Pendorong Kesadaran Sosial dan Keberlanjutan**

SDM yang berpendidikan memiliki kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka mendukung program-program yang menjaga lingkungan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup.

**f. Pemanfaatan SDA Secara Berkelanjutan**

SDM yang kompeten dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka mampu memastikan bahwa SDA dimanfaatkan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

**g. Meningkatkan Produktivitas Nasional**

SDM yang berkualitas meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan jasa. Produktivitas yang tinggi berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**h. Penguatan Institusi dan Tata Kelola**

SDM yang profesional dan berintegritas mampu memperkuat institusi pemerintahan dan tata kelola sumber daya. Ini penting untuk mencegah korupsi, eksploitasi berlebihan, dan konflik terkait SDA.

**i. Menjadi Agen Perubahan Sosial**

SDM yang terdidik dan sadar akan tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kebijakan dan aksi kolektif yang lebih baik.

**j. Meningkatkan Investasi dan Teknologi**

SDM yang inovatif mampu menarik investasi asing maupun domestik melalui pengembangan teknologi, startup, dan proyek infrastruktur besar. Mereka juga menjadi penghubung antara sumber daya finansial dan pemanfaatan SDA secara efisien.

**Keterkaitan SDA dan SDM dalam Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional yang sukses membutuhkan sinergi antara SDA dan SDM. SDA menyediakan basis material untuk pembangunan, tetapi tanpa SDM yang kompeten, SDA tidak akan dapat dikelola secara optimal. Sebaliknya, SDM membutuhkan SDA untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan.

Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus dilakukan secara berkelanjutan, dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas, terutama melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan

kapasitas. Pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan pengembangan SDM berkualitas, pembangunan nasional dapat dicapai secara holistik, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

## **B. INVESTASI DAN MODAL FISIK**

Investasi dan modal fisik memiliki peran yang sangat penting sebagai faktor penentu dalam pembangunan nasional Indonesia. Investasi mengacu pada alokasi sumber daya ekonomi untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan investasi yang memadai, Indonesia dapat mengembangkan berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi, yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Modal fisik, seperti infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas listrik, merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi. Modal fisik memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Misalnya, infrastruktur transportasi yang baik akan

mempercepat distribusi barang dan jasa, sehingga memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Dalam hal ini, investasi dalam pembangunan modal fisik menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya investasi dalam membangun modal fisik. Oleh karena itu, berbagai program telah diluncurkan, seperti proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan pelabuhan internasional bertujuan untuk mempercepat arus barang dan jasa, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik juga menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Peran sektor swasta dalam investasi juga tidak kalah penting. Investasi dari swasta, baik domestik maupun asing, memberikan tambahan modal untuk membangun berbagai proyek strategis. Melalui investasi swasta, inovasi teknologi dan manajemen modern dapat masuk ke Indonesia, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Selain itu, investor asing sering membawa keahlian dan pengalaman global yang berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur dan teknologi informasi.

Namun, keberhasilan investasi dan modal fisik sebagai pendorong pembangunan nasional juga bergantung pada kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak, penyederhanaan izin usaha, dan kepastian hukum, sangat penting untuk menarik lebih banyak investor. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dikelola secara transparan dan efisien agar menghasilkan dampak ekonomi yang maksimal. Reformasi birokrasi juga menjadi kunci untuk mempercepat proses investasi dan pengelolaan proyek.

Selain itu, pembangunan modal fisik harus diimbangi dengan pengembangan modal manusia. Infrastruktur yang baik tidak akan optimal tanpa sumber daya manusia yang terampil dan kompeten. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk melengkapi pembangunan modal fisik. Keseimbangan antara modal fisik dan manusia akan menciptakan sinergi yang mempercepat pembangunan ekonomi.

Dampak investasi dan modal fisik pada pembangunan nasional terlihat dari peningkatan konektivitas antarwilayah. Wilayah-wilayah terpencil kini lebih mudah dijangkau, sehingga mempercepat integrasi ekonomi nasional. Dengan konektivitas yang lebih baik, potensi ekonomi di daerah-daerah dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan antarwilayah tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Investasi yang tepat sasaran juga berperan dalam meningkatkan daya saing global Indonesia. Infrastruktur modern dan efisien menjadi daya tarik utama bagi perusahaan multinasional yang ingin membuka cabang atau pabrik di Indonesia. Dengan demikian, investasi dalam modal fisik tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Namun, tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan investasi dan modal fisik. Masalah seperti pembebasan lahan, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah sering menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini agar investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, investasi dan modal fisik adalah fondasi utama bagi pembangunan nasional Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan pengawasan yang ketat, investasi dalam modal fisik dapat menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan. Hal ini akan membawa Indonesia menuju visi menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Investasi dan modal fisik tidak hanya menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketika infrastruktur fisik berkembang, produktivitas nasional meningkat, yang pada akhirnya memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal seperti krisis global. Dengan kapasitas ekonomi yang lebih

kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian perdagangan internasional atau perubahan iklim dengan lebih percaya diri.

Selain itu, investasi pada modal fisik juga memiliki efek multiplikasi yang signifikan terhadap sektor lain dalam perekonomian. Misalnya, pembangunan jalan tol atau pelabuhan tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga meningkatkan aktivitas sektor pariwisata, manufaktur, dan perdagangan lokal. Hal ini memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, investasi modal fisik juga harus diarahkan pada proyek-proyek yang mendukung pelestarian lingkungan. Proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air adalah contoh konkret bagaimana investasi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan nasional tetapi juga memenuhi komitmen global dalam pengurangan emisi karbon.

Pembangunan modal fisik juga berperan dalam mempercepat transformasi digital. Infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan data center, menjadi dasar bagi Indonesia untuk beralih ke ekonomi digital. Investasi di sektor ini memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan

teknologi dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Dengan infrastruktur digital yang kuat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam era ekonomi berbasis teknologi.

Salah satu aspek penting dari investasi modal fisik adalah keberlanjutan dalam pembiayaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak membebani anggaran negara secara berlebihan atau meningkatkan utang secara tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembiayaan, seperti penerbitan obligasi infrastruktur atau kemitraan dengan lembaga keuangan internasional. Dengan demikian, pembiayaan yang berkelanjutan dapat mendukung proyek jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Lebih jauh lagi, pembangunan modal fisik harus dirancang untuk mengintegrasikan wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan tetapi juga memperluas basis ekonomi nasional dengan mengintegrasikan sumber daya di seluruh wilayah Indonesia.

Peran investasi dan modal fisik sangat penting dalam pembangunan nasional karena keduanya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai peran keduanya:

## 1. Peran Investasi dalam Pembangunan Nasional

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing negara. Berikut adalah beberapa peran utama investasi dalam pembangunan nasional:

- **Meningkatkan Kapasitas Produksi**

Investasi dalam sektor industri, teknologi, dan infrastruktur meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dengan adanya investasi baru, misalnya di sektor manufaktur atau teknologi, negara dapat memproduksi barang dan jasa dengan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan output ekonomi.

- **Penciptaan Lapangan Kerja**

Investasi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Proyek investasi baru sering kali membutuhkan tenaga kerja baru, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- **Transfer Teknologi dan Pengetahuan**

Investasi asing langsung (FDI) sering kali membawa teknologi dan pengetahuan baru yang penting untuk perkembangan industri domestik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengembangkan kapasitas inovasi di dalam negeri.

- **Meningkatkan Infrastruktur**

Investasi di sektor infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, energi, dan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur yang lebih baik mendukung perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas sumber daya manusia, yang mempercepat pembangunan ekonomi.

- **Peningkatan Pendapatan Negara**

Investasi yang berkembang dapat menghasilkan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah, yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

## 2. Peran Modal Fisik dalam Pembangunan Nasional

Modal fisik mengacu pada aset-aset nyata yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, seperti bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Modal fisik ini berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan ekonomi dan produksi di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa peran modal fisik dalam pembangunan nasional:

- **Peningkatan Produktivitas**

Modal fisik yang modern dan efisien memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan lebih murah. Mesin dan teknologi baru meningkatkan output per pekerja dan mengurangi biaya produksi, yang sangat penting untuk daya saing global.

- **Mendukung Infrastruktur dan Konektivitas**

Modal fisik di sektor infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara, memungkinkan distribusi barang dan jasa secara efisien. Infrastruktur yang baik mempermudah arus barang dan orang, serta mengurangi biaya logistik yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Pembangunan Sumber Daya Alam**

Modal fisik juga digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, seperti tambang, perikanan, dan energi. Dengan investasi dalam peralatan dan teknologi yang lebih canggih, negara dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya.

- **Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**

Modal fisik yang mendukung keberlanjutan, seperti teknologi energi terbarukan atau fasilitas pengolahan limbah, sangat penting untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan modal fisik ini, negara dapat menjaga kelestarian sumber daya alam sambil tetap mengembangkan perekonomiannya.

- **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**

Pembangunan modal fisik di sektor kesehatan, pendidikan, dan perumahan langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis canggih dan sekolah dengan fasilitas modern dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat,

yang pada gilirannya mendukung pembangunan sumber daya manusia.

### **3. Peran Investasi dalam Pembangunan Nasional (Lanjutan)**

- **Diversifikasi Ekonomi**

Investasi, terutama dalam sektor-sektor baru dan inovatif, membantu negara mendiversifikasi ekonominya. Negara yang bergantung pada satu sektor, misalnya, sumber daya alam, akan menghadapi risiko besar jika harga komoditas dunia turun. Investasi dalam sektor teknologi, pariwisata, atau manufaktur dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap krisis global.

- **Penguatan Sektor Keuangan dan Pasar Modal**

Investasi juga dapat memperkuat sektor keuangan dan pasar modal, yang penting untuk mobilisasi dana untuk pembangunan. Dengan adanya pasar modal yang berkembang dan sektor keuangan yang kuat, negara dapat memperoleh dana untuk membiayai proyek-proyek besar, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kualitas SDM. Ketika investor atau pemerintah menanamkan modal dalam bidang pendidikan atau pelatihan keterampilan, hal ini akan menciptakan tenaga kerja yang

lebih terampil, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.

- **Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**

Investasi yang diarahkan ke daerah-daerah yang kurang berkembang atau sektor-sektor ekonomi yang masih terabaikan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Investasi semacam ini menciptakan peluang ekonomi di wilayah yang sebelumnya tertinggal dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan secara nasional.

#### **4. Peran Modal Fisik dalam Pembangunan Nasional (Lanjutan)**

- **Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi**

Modal fisik dalam bentuk fasilitas pertanian, industri pangan, dan energi sangat penting untuk ketahanan pangan dan energi suatu negara. Pengembangan pertanian dengan modal fisik seperti alat pertanian modern, irigasi, dan gudang penyimpanan dapat membantu mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan produksi makanan dalam negeri. Selain itu, modal fisik di sektor energi (misalnya, pembangkit listrik dan infrastruktur energi terbarukan) mendukung ketahanan energi nasional yang sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi.

- **Memfasilitasi Perdagangan Internasional**

Modal fisik berupa pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik lainnya mendukung perdagangan internasional yang penting

bagi perekonomian negara. Negara yang memiliki infrastruktur perdagangan yang baik dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan memperlancar ekspor serta impor, yang pada gilirannya memperkuat posisi ekonomi globalnya.

- **Memperkuat Infrastruktur Digital**

Dalam era digital, investasi dalam modal fisik berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting. Pengembangan jaringan internet, pusat data, dan sistem teknologi lainnya mendukung digitalisasi sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Dengan modal fisik ini, negara dapat mempercepat transformasi digital, yang juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.

- **Perbaiki Infrastruktur Sosial**

Modal fisik di sektor sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, juga memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Fasilitas kesehatan yang lebih baik meningkatkan harapan hidup, sementara sekolah yang memadai dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih terampil dan terdidik. Perbaikan dalam infrastruktur sosial berkontribusi terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Sinergi antara Investasi dan Modal Fisik untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan

Investasi dan modal fisik harus berjalan secara sinergis agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Beberapa aspek sinergi ini antara lain:

- **Pendanaan Infrastruktur melalui Investasi**

Banyak proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, bendungan, dan bandara, memerlukan dana yang besar. Investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, sangat penting untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut. Tanpa investasi yang cukup, pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tidak akan terlaksana dengan baik.

- **Peningkatan Daya Saing Nasional**

Ketika investasi dan modal fisik dikelola dengan baik, negara dapat meningkatkan daya saingnya. Infrastruktur yang canggih dan sektor yang didorong oleh investasi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, dengan adanya investasi di sektor teknologi dan riset, negara dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing di pasar internasional.

- **Pembangunan Berkelanjutan**

Investasi dalam modal fisik yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau infrastruktur hijau, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini memastikan

bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan juga dapat menciptakan lapangan kerja hijau, yang mendukung keberlanjutan ekonomi.

## 6. Tantangan dalam Mengoptimalkan Peran Investasi dan Modal Fisik

Tentu saja, ada tantangan dalam mengoptimalkan peran investasi dan modal fisik, antara lain:

- **Ketidakpastian Ekonomi Global**

Ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi atau fluktuasi harga komoditas, dapat mempengaruhi tingkat investasi dan pembangunan modal fisik. Negara harus memiliki kebijakan yang stabil dan mendukung untuk menjaga aliran investasi meskipun dalam situasi yang tidak menentu.

- **Korupsi dan Pemborosan Anggaran**

Korupsi dan pengelolaan anggaran yang buruk dapat menghambat pemanfaatan investasi dan modal fisik secara efisien. Negara perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik untuk memastikan bahwa investasi dan modal fisik digunakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

- **Keterbatasan Infrastruktur Awal**

Beberapa negara mungkin memiliki infrastruktur yang masih sangat terbatas atau usang, sehingga membutuhkan investasi

yang lebih besar untuk membangun atau memperbarui modal fisik. Keterbatasan ini memerlukan perencanaan yang matang dan prioritas yang tepat dalam alokasi sumber daya.

## **7. Peran Investasi dalam Meningkatkan Infrastruktur Kelembagaan dan Pemerintahan**

- **Meningkatkan Kualitas Pemerintahan**

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau melalui kerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan, seperti gedung pemerintahan, pusat data nasional, dan sistem administrasi publik, dapat memperkuat daya saing negara. Infrastruktur yang baik mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan transparan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

- **Digitalisasi Layanan Publik**

Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Contohnya adalah pengembangan sistem e-Government yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat dan transparan. Investasi dalam sektor ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi.

- **Pembangunan Infrastruktur Hukum**

Infrastruktur hukum, seperti pengadilan, lembaga peradilan yang modern, dan sistem hukum yang efisien, dapat

diperkuat dengan investasi yang tepat. Ketersediaan infrastruktur hukum yang baik mendukung kepastian hukum, yang sangat penting bagi iklim investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **8. Peran Modal Fisik dalam Mendorong Pembangunan Sektor-sektor Utama**

- **Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Modal fisik yang digunakan dalam sektor pertanian, seperti irigasi, peralatan pertanian modern, dan gudang penyimpanan pangan, sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sektor ini. Dengan peningkatan teknologi dan infrastruktur pertanian, negara bisa meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan yang lebih baik, terutama di negara dengan populasi besar yang sangat bergantung pada sektor ini.

- **Sektor Energi Terbarukan**

Modal fisik di sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan geotermal, memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Pengembangan modal fisik yang mendukung energi terbarukan tidak hanya membantu ketahanan energi tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Efisien**

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat tergantung pada modal fisik yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam tersebut. Sebagai contoh, investasi dalam infrastruktur pengolahan hasil tambang, perikanan, dan kehutanan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Peran investasi dan modal fisik dalam pembangunan nasional sangat fundamental dan saling mendukung. Investasi memicu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong inovasi, sementara modal fisik memperkuat infrastruktur yang mendukung proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, negara harus memastikan bahwa keduanya dikelola secara efektif dan efisien. Sinergi antara investasi dan modal fisik merupakan kunci untuk membangun perekonomian yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, investasi dan modal fisik berperan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing negara, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang efisien dari keduanya akan membantu negara mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menanggulangi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakesetaraan ekonomi, dan pengangguran. Negara yang berhasil

mengoptimalkan investasi dan modal fisik akan menciptakan landasan yang kuat untuk kemajuan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan sosial.

### **C. TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN**

Teknologi dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam era globalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, kemampuan suatu negara untuk mengadopsi, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Teknologi memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, inovasi menjadi katalisator dalam menciptakan produk, layanan, dan metode baru yang lebih baik guna menghadapi tantangan pembangunan.

Di sektor pertanian, teknologi modern seperti sistem irigasi pintar, penggunaan drone, dan teknik pertanian presisi telah meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor ini. Teknologi memungkinkan para petani untuk memanfaatkan data cuaca, tanah, dan irigasi secara real-time sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya produksi.

Dalam sektor industri, teknologi menjadi fondasi dalam transformasi digital melalui konsep revolusi industri 4.0. Penggunaan robotika,

Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, dan big data telah meningkatkan efisiensi proses manufaktur di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global tetapi juga menciptakan peluang kerja baru berbasis teknologi, seperti analisis data dan pengembangan perangkat lunak.

Pendidikan juga menjadi sektor yang sangat terbantu oleh teknologi dan inovasi. Dengan adanya e-learning, aplikasi pendidikan berbasis digital, dan teknologi augmented reality, akses terhadap pendidikan berkualitas semakin merata, bahkan di daerah terpencil. Ini mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.

Teknologi dan inovasi memainkan peran krusial dalam pembangunan nasional Indonesia karena keduanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, memperluas akses terhadap layanan, serta mendorong daya saing bangsa di era globalisasi. Berikut adalah peran teknologi dan inovasi dalam pembangunan nasional secara mendetil:

### **1. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi**

- **Automasi dan Digitalisasi:** Teknologi memungkinkan proses produksi di berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan perikanan, menjadi lebih efisien melalui penggunaan mesin otomatis, sensor IoT (Internet of Things), dan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI).

- **Pengembangan UMKM:** Inovasi digital seperti e-commerce dan platform fintech membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh pembiayaan dengan mudah.

## 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Transformasi Pendidikan:** Teknologi pendidikan (edtech) seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan virtual reality membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
- **Peningkatan Keterampilan Digital:** Program pelatihan dan sertifikasi berbasis teknologi mendukung masyarakat dalam menguasai keterampilan baru yang relevan dengan era digital.

## 3. Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Baru

- **Ekonomi Digital:** Sektor seperti e-commerce, transportasi online, dan financial technology (fintech) memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional.
- **Teknologi Hijau:** Inovasi di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan berkelanjutan mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

## 4. Meningkatkan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

- **E-Government:** Teknologi mendukung efisiensi birokrasi melalui layanan daring seperti SIM online, e-KTP, dan pelaporan pajak digital.

- **Big Data dan AI:** Data yang diolah secara cerdas membantu pemerintah merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

## 5. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas

- **Pengembangan Infrastruktur Digital:** Pembangunan jaringan internet, seperti program Palapa Ring, memperluas akses internet hingga ke daerah terpencil, mendorong pemerataan pembangunan.
- **Transportasi Pintar:** Sistem transportasi berbasis teknologi, seperti ERP (Electronic Road Pricing) dan aplikasi navigasi, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

## 6. Mendorong Inovasi di Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

- **Teknologi Pertanian Cerdas:** Penggunaan drone, irigasi otomatis, dan aplikasi pemantauan cuaca mendukung efisiensi dan produktivitas petani.
- **Inovasi Bioteknologi:** Pengembangan varietas unggul melalui rekayasa genetika meningkatkan ketahanan terhadap hama dan perubahan iklim.

## 7. Meningkatkan Daya Saing Global

- **Riset dan Pengembangan (R&D):** Investasi dalam penelitian menghasilkan inovasi yang mampu bersaing di pasar global.
- **Ekspor Produk Teknologi Tinggi:** Dengan mengembangkan produk berbasis teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai ekspor.

## 8. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

- **Smart City:** Pengembangan kota pintar mendukung efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
- **Energi Terbarukan:** Inovasi seperti panel surya, turbin angin, dan bioenergi membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

## 9. Memperkuat Ketahanan Nasional

- **Keamanan Siber:** Teknologi membantu melindungi infrastruktur digital dan data negara dari ancaman siber.
- **Teknologi Militer:** Inovasi di sektor pertahanan, seperti drone militer dan sistem radar canggih, meningkatkan kedaulatan negara.

## 10. Meningkatkan Efisiensi Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- **Pemanfaatan Teknologi Geospasial:** Teknologi seperti GIS (Geographic Information System) membantu pengelolaan sumber daya alam, pemetaan wilayah pertambangan, kehutanan, dan perencanaan tata ruang.
- **Efisiensi Energi:** Inovasi teknologi di bidang energi, seperti smart grids dan perangkat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi distribusi listrik.

- **Teknologi Desalinasi:** Teknologi ini mendukung pengelolaan air bersih di wilayah yang mengalami kelangkaan air.

Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara maksimal, Indonesia dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, memastikan posisi yang kompetitif di kancah global.

# MASALAH DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

### A. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mewakili fenomena kompleks dan multidimensi yang diakui sebagai tantangan mendesak yang dihadapi masyarakat global. Masalah-masalah ini tidak hanya mencakup serangkaian kekurangan dan kesenjangan yang melampaui tingkat pendapatan atau konsumsi, namun juga menghasilkan implikasi mendalam bagi kesejahteraan individu, kohesi sosial, dan kemajuan ekonomi. Kemiskinan tidak dapat lagi hanya diukur melalui pendekatan moneter karena sifatnya yang multidimensional. Oleh karena itu, untuk memahami kemiskinan perlu melampaui fokus konvensional pada indikator moneter dengan memasukkan dimensi penting lainnya seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar, dan pengucilan (Acharya *et al.*, 2023; Au, 2023; Zulkifli and Abidin, 2023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Narayan *et al.*, 2000), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat multidimensi dengan menonjolkan enam dimensi yaitu:

“Pertama, kemiskinan terdiri dari banyak dimensi yang saling terkait. Meskipun kemiskinan jarang sekali hanya menyangkut kekurangan satu hal, intinya adalah selalu

kelaparan - kekurangan makanan. Kedua, kemiskinan memiliki dimensi-dimensi psikologis yang penting, seperti ketidakberdayaan, ketergantungan, rasa malu, dan penghinaan. Pemeliharaan identitas budaya dan norma-norma sosial solidaritas membantu orang miskin, masyarakat miskin untuk terus percaya pada kemanusiaan mereka sendiri, meskipun dalam kondisi yang tidak manusiawi. Ketiga, masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar - jalan (terutama di daerah pedesaan), transportasi jalan (terutama di daerah pedesaan), transportasi, dan air bersih. Keempat, meskipun ada kehausan yang meluas untuk melek huruf, sekolah hanya mendapat sedikit perhatian atau ulasan yang beragam. Masyarakat miskin menyadari bahwa pendidikan menawarkan jalan keluar dari kemiskinan - tetapi hanya jika lingkungan ekonomi di masyarakat luas dan kualitas pendidikan meningkat. Kelima, kesehatan yang buruk dan penyakit ditakuti hampir di semua tempat sebagai sumber kemelaratan. Hal ini terkait dengan biaya perawatan kesehatan dan juga pendapatan yang hilang karena sakit. Akhirnya, orang miskin jarang berbicara tentang pendapatan, tetapi lebih fokus pada pengelolaan aset - fisik, manusia, sosial dan lingkungan - sebagai cara untuk mengatasi kerentanan mereka. Di banyak daerah, kerentanan ini kerentanan ini memiliki dimensi gender.”

Kemiskinan didefinisikan juga oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sebagai kondisi individu atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak esensialnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pada tingkat standar sosial yang bermartabat. Apabila kita menilik potret kemiskinan di Indonesia selama periode 2015 – 2023, terinformasikan adanya fluktuasi tingkat kemiskinan pada berbagai provinsi meski ada penurunan moderat pada sebagian daerah seperti provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan kemiskinan sebesar 1,19% dalam kurun waktu 8 tahun. Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sepanjang periode yang konsisten berada diatas 20%, bahkan mencapai 28,4% tertinggi di Papua tahun 2015. Sebaliknya, DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dibawah 5 persen.

Secara nasional, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sepanjang periode 2015-2023 yaitu sebesar 1,77 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi secara bertahap. Walau demikian, disparitas antarprovinsi menjadi tantangan. Berkaca dari fenomena fluktuasi tingkat kemiskinan Indonesia, terdapat interaksi antara disparitas pembangunan ekonomi, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu, dampak kebijakan, dan bencana alam.

Tabel 3.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menurut Provinsi  
(Persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	17,11	16,43	15,92	15,68	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45
Sumatera Utara	10,79	10,27	9,28	8,94	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15
Sumatera Barat	6,71	7,14	6,75	6,55	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Riau	8,82	7,67	7,41	7,21	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
Jambi	9,12	8,37	7,9	7,85	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58
Sumatera Selatan	13,77	13,39	13,1	12,82	12,71	12,66	12,84	11,9	11,78
Bengkulu	17,16	17,03	15,59	15,41	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04
Lampung	13,53	13,86	13,04	13,01	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
Kepulauan Bangka Belitung	4,83	5,04	5,3	4,77	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52
Kepulauan Riau	5,78	5,84	6,13	5,83	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69
DKI Jakarta	3,61	3,75	3,78	3,55	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44
Jawa Barat	9,57	8,77	7,83	7,25	6,91	7,88	8,4	8,06	7,62
Jawa Tengah	13,32	13,19	12,23	11,19	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
DI Yogyakarta	13,16	13,1	12,36	11,81	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04
Jawa Timur	12,28	11,85	11,2	10,85	10,37	11,09	11,4	10,38	10,35
Banten	5,75	5,36	5,59	5,25	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17
Bali	5,25	4,15	4,14	3,91	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25
Nusa Tenggara Barat	16,54	16,02	15,05	14,63	14,56	13,97	14,14	13,68	13,85
Nusa Tenggara Timur	22,58	22,01	21,38	21,03	21,09	20,9	20,99	20,05	19,96
Kalimantan Barat	8,44	8	7,86	7,37	7,49	7,17	7,15	6,73	6,71
Kalimantan Tengah	5,91	5,36	5,26	5,1	4,98	4,82	5,16	5,28	5,11
Kalimantan Selatan	4,72	4,52	4,7	4,65	4,55	4,38	4,83	4,49	4,29
Kalimantan Timur	6,1	6	6,08	6,06	5,94	6,1	6,54	6,31	6,11
Kalimantan Utara	6,32	6,99	6,96	6,86	6,63	6,8	7,36	6,77	6,45
Sulawesi Utara	8,98	8,2	7,9	7,59	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38
Sulawesi Tengah	14,07	14,09	14,22	13,69	13,48	12,92	13	12,33	12,41
Sulawesi Selatan	10,12	9,24	9,48	8,87	8,69	8,72	8,78	8,63	8,7
Sulawesi Tenggara	13,74	12,77	11,97	11,32	11,24	11	11,66	11,17	11,43
Gorontalo	18,16	17,63	17,14	15,83	15,52	15,22	15,61	15,42	15,15
Sulawesi Barat	11,9	11,19	11,18	11,22	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49
Maluku	19,36	19,26	18,29	17,85	17,69	17,44	17,87	15,97	16,42
Maluku Utara	6,22	6,41	6,44	6,62	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46
Papua Barat	25,73	24,88	23,12	22,66	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49
Papua	28,4	28,4	27,76	27,43	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03
<b>Indonesia</b>	<b>11,13</b>	<b>10,7</b>	<b>10,12</b>	<b>9,66</b>	<b>9,41</b>	<b>9,78</b>	<b>10,14</b>	<b>9,54</b>	<b>9,36</b>

Sumber: BPS RI, 2024.

Perspektif dari kebijakan, peran pemerintah melalui kekuatan anggarannya berupa belanja pemerintah berpengaruh untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Purmini and Rambe, 2021; Florennica and Febriani, 2023). Oleh karena itu, pemahaman

komprehensif tentang kemiskinan ini sangat penting untuk perumusan kebijakan dan intervensi yang efektif yang menargetkan berbagai faktor yang berkontribusi pada persistensi kemiskinan. Kemiskinan dibentuk oleh interaksi kompleks faktor penentu ekonomi, sosial, dan politik. Faktor makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran ikut andil terhadap tingkat kemiskinan (Febriani *et al.*, 2021). Namun, faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah kurangnya akses ke sumber daya produktif, termasuk tanah, kredit, dan teknologi, yang dapat membatasi kapasitas individu miskin untuk terlibat dalam upaya ekonomi yang lebih menguntungkan dan meningkatkan mata pencaharian mereka. Akses terbatas terhadap sumber daya produktif tersebut dapat menjerat individu dan masyarakat dalam siklus yang merugikan, ditandai dengan pendapatan rendah, kesehatan yang tidak memadai, dan prospek pendidikan yang terbatas, sehingga semakin memperburuk kemiskinan mereka (García-Vélez and Nuñez Velázquez, 2021; Rambe *et al.*, 2023).

Secara umum kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengandung arti sebagai kondisi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Sementara kemiskinan relatif adalah kondisi seseorang yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari rata-rata masyarakat dilingkungannya. Kemiskinan absolut terkadang diukur dengan jumlah orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan ini ditentukan pada tingkat tetap yang disesuaikan

dengan setiap wilayah, seperti di Provinsi Aceh, garis kemiskinannya sebesar Rp661.227, di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp825.288, namun di Kota Jakarta selatan tertinggi dengan Rp928.278 dibanding kota lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2024.

Sementara, sering kita dengar kalimat “orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya”. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada konsep perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh negara atau sekelompok masyarakat secara berkelanjutan tanpa terputus seperti lingkaran setan yang terus berputar, kemiskinan memperparah kemiskinan itu sendiri (Rambe, Purmini and Anitasari, 2023). Nurkse melihat kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya pendapatan, tabungan sedikit, investasi yang kurang, pembentukan modal rendah, kurangnya produktivitas, dan rendahnya tingkat lapangan kerja (Ridwan, 2022).

### **Ketimpangan Pendapatan**

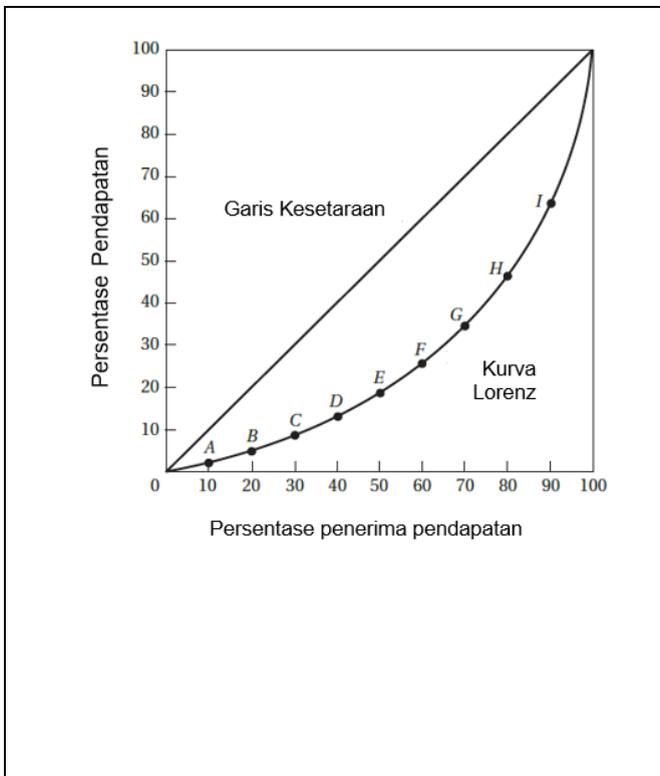
Ketimpangan pendapatan menjadi tantangan serius bagi banyak negara. Pernahkan terpikirkan kenapa sebagian orang menguasai sebagian besar kekayaan? ketimpangan pendapatan adalah jawabannya. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu dalam masyarakat. Topik ini menjadi perhatian dalam bidang studi ekonomi, karena memiliki implikasi pada berbagai dimensi kehidupan, meliputi pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi. Teori ekonomi memberikan berbagai perspektif yang memfasilitasi

pemahaman tentang penyebab dasar dan konsekuensi dari ketimpangan ini.

Faktor utama yang memperburuk ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam kepemilikan faktor produksi. Individu yang memiliki akses lebih besar ke modal, tanah, atau sumber daya alam biasanya mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, globalisasi telah berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan kesenjangan ini, terutama mengingat persaingan yang semakin ketat yang lazim di pasar tenaga kerja global. Selain itu, kemajuan pesat dalam teknologi dapat semakin meningkatkan ketimpangan, karena individu yang memiliki keterampilan tingkat tinggi yang dapat beradaptasi dengan teknologi yang muncul umumnya memiliki upah yang lebih tinggi.

Teori distribusi pendapatan berusaha untuk menjelaskan mekanisme di mana pendapatan dialokasikan di antara berbagai faktor produksi, termasuk tenaga kerja, modal, dan tanah. Misalnya, teori neo-klasik berpendapat bahwa distribusi pendapatan bergantung pada produktivitas marginal yang terkait dengan setiap faktor produksi. Namun demikian, kerangka teoritis ini sering dianggap terlalu sederhana untuk menjelaskan seluk-beluk distribusi pendapatan secara komprehensif dalam konteks dunia nyata. Teori ekonomi heterodoks, seperti teori Marx atau teori ketergantungan, memberikan perspektif yang lebih kritis dengan menggarisbawahi pentingnya dinamika sosial dan politik dalam mempengaruhi distribusi pendapatan.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, secara umum ada dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kurva Lorenz adalah instrumen grafis yang mengukur disparitas dalam distribusi pendapatan masyarakat dengan menyandingkan pendapatan aktual dan pendapatan ideal, dimana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sementara koefisien gini berupa rentang antara 0 dan 1 yang menyatakan tingkat ketimpangan semakin tinggi jika mendekati 1 dan angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna.



Gambar 3.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz membantu dalam memahami ketimpangan, sebagaimana tertampil pada Gambar 3.1. Garis diagonal lurus mewakili distribusi pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki persentase pendapatan yang sama dengan persentase penduduk. Kurva Lorenz keberadaannya selalu dibawah garis diagonal. Semakin jauh jarak antara kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Sedangkan area antara kurva Lorenz dan garis diagonal disebut koefisien gini. Secara faktual, ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia seperti yang tertampil pada tabel 3.2 memberikan gambaran bahwa terjadi perbedaan yang mencolok terkait distribusi pendapatan di provinsi wilayah bagian barat, tengah, dan timur, meski secara nasional cenderung turun namun fluktuasi masih terlihat. Provinsi seperti Aceh dan Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan ketimpangan, sebaillnya provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta tercatat secara konsisten memiliki rasio gini yang tinggi, mengindikasikan tantangan serius untuk mewujudkan pendapatan yang merata, meski provinsi-provinsi ini sebagai pusat ekonomi dan pendidikan.

Tabel 3.2 Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia

No	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Maret)
1	ACEH	0,339	0,341	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291	0,296	0,294
2	SUMATERA UTARA	0,326	0,312	0,335	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326	0,309	0,297
3	SUMATERA BARAT	0,319	0,312	0,312	0,305	0,307	0,301	0,3	0,292	0,28	0,283
4	RIAU	0,366	0,347	0,325	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324	0,307
5	JAMBI	0,344	0,346	0,334	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343	0,321
6	SUMATERA SELATAN	0,334	0,362	0,365	0,341	0,339	0,338	0,34	0,33	0,338	0,333
7	BENGKULU	0,371	0,354	0,349	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333	0,342
8	LAMPUNG	0,352	0,358	0,333	0,326	0,331	0,32	0,314	0,313	0,324	0,302
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,275	0,288	0,276	0,272	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245	0,244
10	KEP. RIAU	0,339	0,352	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,34	0,349
11	DKI JAKARTA	0,421	0,397	0,409	0,39	0,391	0,4	0,411	0,412	0,431	0,423
12	JAWA BARAT	0,426	0,402	0,393	0,405	0,398	0,398	0,406	0,412	0,425	0,421
13	JAWA TENGAH	0,382	0,357	0,365	0,357	0,358	0,359	0,368	0,366	0,369	0,367
14	DI YOGYAKARTA	0,42	0,425	0,44	0,422	0,428	0,437	0,436	0,459	0,449	0,435
15	JAWA TIMUR	0,403	0,402	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387	0,372
16	BANTEN	0,386	0,392	0,379	0,367	0,361	0,365	0,363	0,377	0,368	0,353
17	BALI	0,399	0,374	0,379	0,364	0,37	0,369	0,375	0,362	0,362	0,361
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,36	0,365	0,378	0,391	0,374	0,386	0,384	0,374	0,375	0,361
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,348	0,362	0,359	0,359	0,355	0,356	0,339	0,34	0,325	0,316
20	KALIMANTAN BARAT	0,33	0,331	0,329	0,325	0,318	0,325	0,315	0,311	0,321	0,31
21	KALIMANTAN TENGAH	0,3	0,347	0,327	0,344	0,335	0,32	0,32	0,309	0,317	0,301
22	KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,351	0,347	0,34	0,334	0,351	0,325	0,309	0,313	0,302
23	KALIMANTAN TIMUR	0,315	0,328	0,333	0,342	0,335	0,335	0,331	0,317	0,322	0,321
24	KALIMANTAN UTARA	0,314	0,305	0,313	0,304	0,292	0,3	0,285	0,27	0,277	0,264
25	SULAWESI UTARA	0,366	0,379	0,394	0,372	0,376	0,368	0,359	0,359	0,37	0,36
26	SULAWESI TENGAH	0,37	0,347	0,345	0,317	0,33	0,321	0,326	0,305	0,304	0,301
27	SULAWESI SELATAN	0,404	0,4	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377	0,363
28	SULAWESI TENGGARA	0,381	0,388	0,404	0,392	0,393	0,388	0,394	0,366	0,371	0,37
29	GORONTALO	0,401	0,41	0,405	0,417	0,41	0,406	0,409	0,423	0,417	0,414
30	SULAWESI BARAT	0,362	0,371	0,339	0,366	0,365	0,356	0,366	0,371	0,351	0,354
31	MALUKU	0,338	0,344	0,321	0,326	0,32	0,326	0,316	0,306	0,288	0,282
32	MALUKU UTARA	0,286	0,309	0,33	0,336	0,31	0,29	0,278	0,309	0,3	0,316
33	PAPUA BARAT	0,428	0,401	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374	0,384	0,37	0,389
35	PAPUA	0,392	0,399	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396	0,393	0,386	0,362
39	INDONESIA	0,402	0,394	0,391	0,384	0,38	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Sumber: BPS RI, 2024

Secara keseluruhan, data koefisien Gini ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang lebih tepat dan disesuaikan secara geografis. Di daerah yang mengalami peningkatan koefisien Gini, strategi yang mempromosikan inklusivitas ekonomi, meningkatkan investasi di sektor pendidikan, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sangat penting. Sebaliknya, di daerah yang koefisien Gini lebih rendah, penekanan pada peningkatan produktivitas dan

diversifikasi lanskap ekonomi dapat memfasilitasi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan tanpa memperburuk ketimpangan.

## **B. PENGANGGURAN DAN KETERBATASAN LAPANGAN KERJA**

Mengapa individu tertentu dalam angkatan kerja menganggur? Pertanyaan ini memperkenalkan beberapa masalah paling kompleks dalam ranah ekonomi. Keseimbangan kompetitif berfungsi untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja dengan permintaan pekerja yang sesuai. Upah ekuilibrium memfasilitasi pembukaan pasar tenaga kerja, sehingga memungkinkan semua individu yang mencari pekerjaan dapat bekerja.

Meskipun demikian, pengangguran kadang-kadang dapat bermanifestasi sebagai kejadian yang menyebar luas. Pemahaman tentang keberadaan dan persistensi proporsi besar individu yang menganggur sangat menantang ketika dievaluasi melalui lensa model penawaran dan permintaan pasar kerja, kecuali (1) perusahaan menawarkan upah yang melebihi tingkat ekuilibrium, sehingga menghasilkan surplus tenaga kerja, dan (2) tingkat upah bersifat “kaku,” sehingga sulit menyesuaikan ke titik keseimbangan.

Fenomena pengangguran dapat dikaitkan dengan banyak faktor, dengan kategori pengangguran tertentu menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar. Misalnya, ada keadaan terus-menerus di mana banyak individu menemukan diri mereka “di antara” posisi pekerjaan. Situasi ini mungkin timbul dari pengunduran diri dari pasar kerja secara sukarela, pemutusan hubungan kerja yang tidak disengaja, atau

dari proses memasuki (atau memasuki kembali) pasar kerja. Proses memperoleh pengetahuan dan mengidentifikasi peluang kerja yang layak membutuhkan banyak waktu. Akibatnya, bahkan dalam kondisi pasar kerja yang berfungsi dengan baik—ditandai dengan keseimbangan antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah individu yang mencari pekerjaan—beberapa tingkat pengangguran pasti akan tetap ada saat individu terlibat dalam proses pencarian kerja.

*International Labor Organization* (ILO) membuat konsep mengenai pengangguran terbuka sebagai suatu keadaan yang mana individu berada dalam posisi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang memproses usaha baru, atau individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari kerja, karena mengasumsikan bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan tidak ada, dan juga mereka yang berstatus bekerja tetapi pekerjaannya belum mulai dilakukan. Sementara, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mendefinisikan pengangguran sebagai:

“penduduk berumur 15 tahun keatas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja.”

Pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu:

a. Pengangguran berdasarkan penyebabnya

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari kesulitan temporer dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan lowongan yang ada. Kesulitan sementara ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, atau dapat juga disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pelamaran dan seleksi.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang tercipta akibat terjadinya perubahan siklus ekonomi seperti perlambatan atau resesi yang menyebabkan daya beli masyarakat melemah sehingga dari sisi produsen terjadi penyesuaian biaya produksi dengan melakukan pemotongan biaya termasuk untuk pemberhentian karyawan.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terbentuk oleh adanya perubahan musim.

4. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang hadir akibat adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan ini dapat berupa perubahan teknologi, ketidakcocokan geografis, dan kurangnya keterampilan yang memadai.

b. Pengangguran berdasarkan ciri-cirinya

1. Pengangguran Terbuka

Kondisi individu yang tidak bekerja sama sekali namun sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.

2. Pengangguran Tersembunyi

Orang dengan status bekerja namun memiliki produktivitas kerja rendah atau tidak ada sama sekali.

3. Setengah Menganggur

Orang yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memenuhi kriteria standar minimum jam kerja per minggu, contoh para pekerja *part time* atau juga.

**Tingkat Pengangguran Kondisi Stabil (*Steady State*)**

Pengangguran kondisi stabil (*steady state*) merupakan fenomena di mana tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian mencapai keadaan keseimbangan jangka panjang, menandakan bahwa masuknya individu ke dalam kategori pengangguran setara dengan jumlah keluarnya individu dari status pengangguran (Borjas, 2020). Dengan istilah lain, dalam konteks kondisi stabil (*steady state*), tingkat pengangguran tetap statis dari waktu ke waktu karena keseimbangan yang harmonis antara arus masuk dan keluar individu dari pasar tenaga kerja.

1. Konsep Dasar

Dalam kerangka ekonomi makro dasar, fenomena pengangguran stabil dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$U^* = \frac{\alpha}{\alpha + f}$$

Keterangan:

$U^*$  = Tingkat pengangguran stabil (*steady state*)

$\alpha^*$  = Tingkat kehilangan pekerjaan

$f$  = Tingkat mendapatkan pekerjaan

Dalam konteks ini:

Apabila  $\alpha$  meningkat, maka tingkat pengangguran stabil (*steady state*) mengiringi peningkatan tersebut. Demikian juga ketika  $f$  meningkat, kondisi pengangguran stabil (*steady state*) akan mengalami penurunan.

## 2. Dinamika Pengangguran Stabil (*Steady State*)

Tingkat pengangguran dalam perekonomian menunjukkan variabilitas di sekitar keseimbangan yang stabil sebagai konsekuensi dari perubahan siklus ekonomi, intervensi pemerintah, atau berbagai pengaruh eksternal. Namun, dalam jangka panjang, ekonomi cenderung kembali ke tingkat ekuilibrium, kecuali terjadinya transformasi struktural yang substansial.

Secara matematis, dinamika ini dapat ditulis dengan persamaan berikut:

$$\Delta U = \alpha \times E - f \times U$$

di mana:

$\Delta U$  = Perubahan jumlah pengangguran

$E$  = Jumlah individu yang bekerja

$U$  = Jumlah pengangguran

Pada saat *steady state*, tingkat pengangguran ( $\Delta U$ ) perubahannya sama dengan nol:

$$\alpha \times E = f \times U$$

### 3. Implikasi Pengangguran Stabil (*Steady State*)

Pengangguran kondisi stabil (*steady state*) memiliki beberapa implikasi penting:

- Efisiensi Pasar Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran kondisi stabil (*steady state*) berfungsi sebagai indikator efisiensi pasar tenaga kerja dalam mengasimilasi sumber daya tenaga kerja dan menghasilkan peluang kerja.

- Kebijakan Ekonomi

Intervensi oleh entitas pemerintah, termasuk inisiatif pelatihan tenaga kerja, insentif untuk penciptaan lapangan kerja, atau kerangka kerja peraturan untuk pasar tenaga kerja, berpotensi mempengaruhi tingkat pengangguran negara tetap.

- Struktur Ekonomi

Transformasi dalam struktur ekonomi, seperti transisi dari domain manufaktur ke industri jasa, dapat berdampak pada tingkat pengangguran stabil (*steady state*).

### 4. Pengangguran Alami dan Stabil (*Steady State*)

Pengangguran kondisi stabil (*steady state*) sering dikaitkan dengan tingkat pengangguran alami, yaitu tingkat pengangguran yang berlaku ketika pasar tenaga kerja berada dalam keadaan

keseimbangan jangka panjang. Pengangguran alami mencakup pengangguran friksional dan struktural yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan melalui intervensi kebijakan makroekonomi.

$$U^* = U_{alamiah}$$

Di luar kondisi stabil (*steady state*), tingkat pengangguran dapat naik dan turun akibat fluktuasi ekonomi. Namun dalam jangka panjang, perekonomian akan cenderung bergeser ke posisi tingkat pengangguran alami ini.

Sesungguhnya pengangguran stabil (*steady state*) mengarah ke pengangguran alamiah, khususnya ketika perekonomian dalam posisi stabil tanpa ada fluktuasi tajam. Akan tetapi, apabila ada perubahan struktural dalam perekonomian seperti perubahan kebijakan tenaga kerja atau kemajuan teknologi yang masif), maka tingkat kestabilan menjadi berbeda dari tingkat pengangguran ilmiah.

Pengangguran kondisi stabil (*steady state*) merupakan konstruksi dinamis yang menekankan transisi tenaga kerja masuk dan keluar dari pengangguran, berbeda dengan pengangguran alami yang menandakan tingkat pengangguran stabil yang bertahan selama periode yang lama tanpa adanya tekanan inflasi. Meskipun kedua konsep ini berbeda, mereka saling berhubungan dalam penggambaran mereka tentang keseimbangan dalam pasar tenaga kerja.

## Teori Pengangguran

### 1. Hipotesa Substitusi Antartemporal

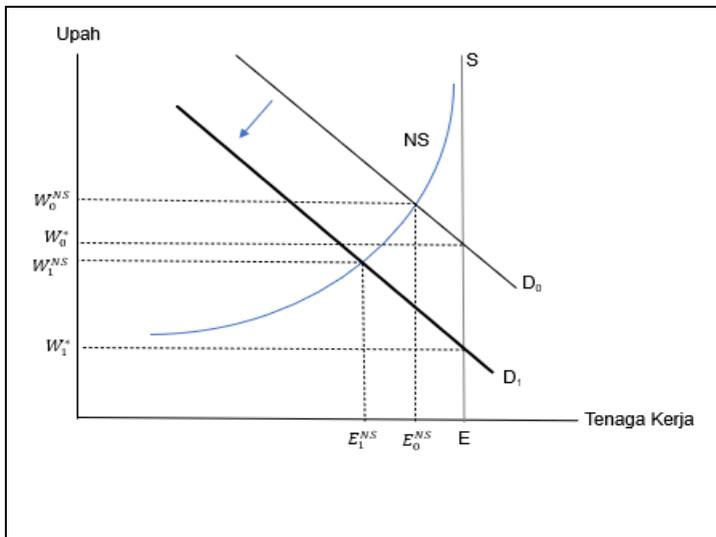
Dalam konsep teori penawaran tenaga kerja selama siklus hidup, diprediksi bahwa pekerja memiliki insentif untuk bekerja sepanjang tahun apabila tingkat upah tinggi dan menikmati waktu luang pada saat tingkat upah rendah. Hipotesa substitusi antartemporal (*Intertemporal substitution hypothesis*) menjelaskan pengangguran muncul sebagai hasil dari keputusan pekerja mengalokasikan waktunya selama siklus bisnis. Pekerja akan mempertimbangkan optimalisasi waktu mereka untuk bekerja dengan mempertimbangkan tingkat upah sekarang dan tingkat upah mendatang. Teori ini menerapkan konsep alokasi waktu dan utilitas individu dalam teori ekonomi mikro. Ada beberapa prinsip utama yang melandasi yaitu: a) Preferensi yang dimiliki oleh individu untuk menentukan alokasi waktu bekerja dan waktu luang; b) Tingkat upah adalah alat penentu bagi individu dalam menetapkan keputusan bekerja saat ini atau menunggu hingga masa mendatang; c) Individu akan mengurangi waktu luang sekarang dan bekerja lebih banyak jika ekspektasi upah di masa depan lebih rendah dari saat ini; d) sebaliknya, jika tingkat upah sekarang lebih rendah dibandingkan ekspektasi di masa depan, individu memilih meluangkan waktu lebih banyak untuk bersantai dan mengurangi waktu bekerja. Sementara itu, pada hipotesa ini terdapat dua asumsi yaitu: (1) Upah riil bersifat prosiklikal; dan (2) penawaran tenaga kerja merespon perubahan upah riil.

## 2. Hipotesa Pergeseran Sektoral

Terjadinya peningkatan pengangguran akibat adanya perubahan struktural dalam perekonomian sehingga tenaga kerja harus berpindah sektor kerja dari posisi awal ke sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja akibat perubahan struktural tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran sektoral yaitu perubahan teknologi, globalisasi, perubahan preferensi konsumen, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, teori ini menekankan perlu dilakukan pelatihan ulang dan mobilitas tenaga kerja agar pengangguran struktural dapat diatasi.

## 3. Efisiensi Upah dan Pengangguran

Teori efisiensi upah menjelaskan tentang kaitan antara pengangguran dan diskriminasi upah, yang mempertegas bahwa produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam teori ini diungkapkan bahwa perusahaan dimungkinkan untuk membayar upah karyawan lebih tinggi dari tingkat upah ekuilibrium di pasar kerja sehingga mendorong produktivitas dan kinerja pekerja mereka meningkat (Borjas, 2020).



Gambar 3.2 Kontraksi Ekonomi dan Upah Efisien

Model upah efisiensi menyatakan bahwa tingkat upah akan relatif konstan sepanjang fluktuasi siklus bisnis. Seandainya permintaan agregat mengalami penurunan tajam karena kontraksi mendadak dalam aktivitas ekonomi, dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan tenaga kerja mengalami pergeseran ke bawah dari  $D_0$  ke  $D_1$ , menghasilkan pengurangan upah kompetitif dari  $W_0^*$  menjadi  $W_1^*$  (lihat Gambar 3,2). Jika perusahaan memberikan upah pada tingkat upah efisiensi, penurunan permintaan yang sama akan memicu penurunan upah dari  $W_0^{NS}$  ke  $W_1^{NS}$ . Akibatnya, upah efisiensi menunjukkan respons yang berkurang terhadap perubahan permintaan bila dibandingkan dengan upah yang kompetitif. Selanjutnya, lapangan pekerjaan menurun dari  $E_0^{NS}$  ke  $E_1^{NS}$  selama fase kontraksi, yang secara bersamaan mengarah pada peningkatan jumlah pengangguran. Pengangguran yang timbul ini bukan disebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran

tenaga kerja, melainkan akibat keputusan perusahaan untuk mempertahankan upah efisien diatas tingkat keseimbangan sehingga pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.

### **Kondisi Pengangguran di Indonesia**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang terkait erat dengan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan variabel eksogen seperti pandemi. Tabel 3.3 menyajikan informasi fluktuasi pengangguran di Indonesia. Penurunan TPT dari 6,18% pada 2015 menjadi 5,23% pada 2019 menandakan momentum pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, didorong oleh investasi domestik, peningkatan belanja pemerintah, dan ekspansi di sektor manufaktur dan jasa. Peningkatan yang nyata menjadi 7,07% pada tahun 2020 menandakan dampak langsung dari pandemi COVID-19, yang telah memicu kontraksi ekonomi, gangguan rantai pasokan, dan langkah-langkah mobilitas pembatasan yang mempengaruhi sektor informal yang mencakup sebagian besar tenaga kerja.

Pemulihan berikutnya yang diamati dari 2021 hingga 2024, dengan TPT menurun serendah 4,91%, menggambarkan kemanjuran intervensi fiskal dan moneter ekspansif, yang mencakup inisiatif bantuan sosial, langkah-langkah stimulus ekonomi, di samping investasi infrastruktur yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disparitas tingkat pengangguran terbuka (TPT) antar provinsi menandakan variasi atribut ekonomi regional, tingkat industrialisasi, dan ketersediaan peluang kerja. Provinsi yang menunjukkan tingkat

TPT tinggi, seperti Kepulauan Riau (6,30%) dan DKI Jakarta (6,21%), menghadapi hambatan struktural yang berasal dari ketergantungan terhadap sektor jasa dan manufaktur yang sangat rentan akan fluktuasi ekonomi global.

Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Provinsi per Agustus (Persen)

PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACEH	9,93	7,57	6,57	6,34	6,17	6,59	6,3	6,17	6,03	5,75
SUMATERA UTARA	6,71	5,84	5,6	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,6
SUMATERA BARAT	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
RIAU	7,83	7,43	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	3,7
JAMBI	4,34	4	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
SUMATERA SELATAN	6,07	4,31	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86
BENGKULU	4,91	3,3	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11
LAMPUNG	5,14	4,62	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
KEP. BANGKA BELITUNG	6,29	2,6	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
KEP. RIAU	6,2	7,69	7,16	8,04	7,5	10,34	9,91	8,23	6,8	6,39
DKI JAKARTA	7,23	6,12	7,14	6,65	6,54	10,95	8,5	7,18	6,53	6,21
JAWA BARAT	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
JAWA TENGAH	4,99	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
DI YOGYAKARTA	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
JAWA TIMUR	4,47	4,21	4	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
BANTEN	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
BALI	1,99	1,89	1,48	1,4	1,57	5,63	5,37	4,8	2,69	1,79
NUSA TENGGARA BARAT	5,69	3,94	3,32	3,58	3,28	4,22	3,01	2,89	2,8	2,73
NUSA TENGGARA TIMUR	3,83	3,25	3,27	2,85	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
KALIMANTAN BARAT	5,15	4,23	4,36	4,18	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05	4,86
KALIMANTAN TENGAH	4,54	4,82	4,23	3,91	4,04	4,58	4,53	4,26	4,1	4,01
KALIMANTAN SELATAN	4,92	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31	4,2
KALIMANTAN TIMUR	7,5	7,95	6,91	6,41	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
KALIMANTAN UTARA	5,68	5,23	5,54	5,11	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01	3,9
SULAWESI UTARA	9,03	6,18	7,18	6,61	6,01	7,37	7,06	6,61	6,1	5,85
SULAWESI TENGAH	4,1	3,29	3,81	3,37	3,11	3,77	3,75	3	2,95	2,94
SULAWESI SELATAN	5,95	4,8	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
SULAWESI TENGGARA	5,55	2,72	3,3	3,19	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15	3,09
GORONTALO	4,65	2,76	4,28	3,7	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
SULAWESI BARAT	3,35	3,33	3,21	3,01	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
MALUKU	9,93	7,05	9,29	6,95	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31	6,11
MALUKU UTARA	6,05	4,01	5,33	4,63	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
PAPUA BARAT	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,8	5,84	5,37	5,38	4,13
PAPUA	3,99	3,35	3,62	3	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67	6,48
<b>INDONESIA</b>	<b>6,18</b>	<b>5,61</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,23</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>5,86</b>	<b>5,32</b>	<b>4,91</b>

Sumber: BPS RI, 2024

Fenomena urbanisasi yang cepat di wilayah tersebut secara bersamaan memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, ditandai dengan terbatasnya kapasitas penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, provinsi seperti Sulawesi Barat (2,68%) dan Bali (1,70%) memiliki tingkat pengangguran yang rendah, disebabkan oleh sektor pariwisata dan pertanian yang terus berfungsi sebagai landasan ekonomi lokal, di samping tidak adanya urbanisasi yang berlebihan. Meskipun demikian, TPT yang relatif rendah di wilayah ini memerlukan pertimbangan hati-hati, karena dapat mengindikasikan kendala dalam diversifikasi ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk bencana alam atau penurunan pariwisata.

Tabel 3.4 Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 2000-2024 (orang)

Tahun	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan								Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak/belum tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/ SMK	Akademi/ Diploma	Universitas	
2000	29.010	192.232	1.216.976	1.367.892	1.894.986	651.369	184.690	276.076	5.813.231
2001	278.329	573.097	1.893.565	1.786.317	1.881.578	1.051.912	251.134	289.099	8.005.031
2002	214.740	653.568	2.353.330	2.146.495	2.138.263	1.105.867	250.426	269.415	9.132.104
2003	352.518	710.354	2.495.928	2.458.913	2.435.819	1.037.103	202.809	245.857	9.939.301
2004	336.027	668.269	2.275.281	2.690.912	2.441.161	1.254.343	237.251	348.107	10.251.351
2005	264.458	673.527	2.729.915	3.151.231	3.069.305	1.306.770	308.522	395.538	11.899.266
2006	170.666	611.254	2.589.699	2.730.045	2.851.518	1.305.190	278.074	395.554	10.932.000
2007	94.301	438.519	2.179.792	2.264.198	2.532.204	1.538.349	397.191	566.588	10.011.142
2008	103.206	443.832	2.099.968	1.973.986	2.403.394	1.409.128	362.683	598.318	9.394.515
2009	90.471	547.430	1.531.671	1.770.823	2.472.245	1.407.226	441.100	701.651	8.962.617
2010	157.586	600.221	1.402.858	1.661.449	2.149.123	1.195.192	443.222	710.128	8.319.779
2011	205.388	737.610	1.241.882	2.138.864	2.376.254	1.161.362	276.816	543.216	8.681.392
2012	85.374	512.041	1.452.047	1.714.776	1.867.755	1.067.009	200.028	445.836	7.344.866
2013	81.432	489.152	1.347.555	1.689.643	1.925.660	1.258.201	185.103	434.185	7.410.931
2014	74.898	389.550	1.229.652	1.566.838	1.962.786	1.332.521	193.517	495.143	7.244.905
2015	55.554	371.542	1.004.961	1.373.919	2.280.029	1.569.690	251.541	653.586	7.560.822
2016	59.346	384.069	1.035.731	1.294.483	1.950.626	1.520.549	219.736	567.235	7.031.775
2017	62.984	404.435	904.561	1.274.417	1.910.829	1.621.402	242.937	618.758	7.005.262
2018	32.315	328.781	908.228	1.142.168	1.945.826	1.752.241	223.456	740.370	7.073.385
2019	40.771	347.712	865.778	1.137.195	2.008.035	1.739.625	218.954	746.354	7.104.424
2020	31.379	428.813	1.410.537	1.621.518	2.662.444	2.326.599	305.261	981.203	9.767.754
2021	23.905	431.329	1.393.492	1.604.448	2.472.859	2.111.338	216.024	848.657	9.102.052
2022	15.206	663.125	1.274.153	1.500.807	2.478.173	1.661.492	159.490	673.485	8.425.931
2023	29.148	344.881	979.668	1.246.932	2.514.481	1.780.095	171.897	787.973	7.855.075
2024 (Februari)	13.598	394.364	857.486	1.154.255	2.107.781	1.621.672	173.846	871.860	7.194.862

Sumber: BPS RI, 2024.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh lulusan SLTA sederajat namun trennya menurun. Akan tetapi untuk tingkat pengangguran dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi, tren menunjukkan peningkatan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar (*skill mismatch*), kurangnya pengalaman kerja, ekspektasi gaji dan posisi yang terlalu tinggi, dst. Sebaliknya untuk pekerja yang tidak atau belum pernah sekolah menjadi kelompok pengangguran terendah.

### **C. MASALAH SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI**

Sektor pertanian dan industrialisasi menunjukkan saling ketergantungan yang signifikan dalam kerangka pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks negara-negara berkembang. Reformasi agraria dan realokasi lahan telah muncul sebagai langkah awal penting yang bertujuan untuk menambah akses petani kecil ke lahan subur, sehingga memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan. Meskipun demikian, peningkatan produktivitas dan modernisasi pertanian sangat penting bagi sektor ini untuk bersaing secara efektif di pasar domestik dan internasional. Sebaliknya, fenomena migrasi dan urbanisasi dari daerah pedesaan ke pusat-pusat kota sering dipicu oleh ketidaksetaraan pendapatan antara sektor pertanian dan industri, yang berpotensi menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian.

Dalam paradigma industrialisasi, negara memainkan peran integral untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kemajuan industri melalui investasi strategis, peningkatan infrastruktur, dan insentif yang diarahkan pada industri-industri utama. Namun, hambatan dalam perdagangan dan kebijakan industri sering muncul, termasuk perlindungan produk dalam negeri dan integrasi dengan pasar global. Selain itu, laju kemajuan teknologi yang cepat telah secara signifikan mempengaruhi deindustrialisasi, dengan banyak negara bergulat dengan tantangan untuk mempertahankan fondasi industri mereka dalam menghadapi persaingan global dan otomatisasi. Akibatnya, peningkatan sinergi antara sektor pertanian dan industrialisasi harus

terus diupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Reformasi Agraria dan Pembagian Tanah**

Reformasi agraria dan redistribusi tanah merupakan elemen penting dari kemajuan sosial-ekonomi, terutama dalam komunitas agraria di mana tanah berfungsi sebagai aset utama untuk rezeki. Reformasi agraria mencakup kebijakan dan strategi yang dirancang untuk mengalokasikan kembali tanah dari pemilik tanah besar ke petani tak bertanah atau petani skala kecil, sehingga memperbaiki ketidakadilan historis dan kesenjangan ekonomi. Keberhasilan reformasi semacam itu sering bergantung pada kerangka hukum yang dilembagakan oleh negara, yang berusaha untuk menjamin akses yang adil ke tanah. Misalnya, pelaksanaan undang-undang reformasi pertanahan, termasuk Keputusan Menteri Agraria dan Rencana Tata Ruang Nomor 276 di Indonesia, telah menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan kepemilikan dan distribusi tanah yang adil, terutama di daerah seperti Kabupaten Buleleng, di mana otoritas pertanahan setempat telah mendokumentasikan lonjakan signifikan dalam aplikasi hak atas tanah yang dikaitkan dengan reformasi ini (Surata and Sena, 2022).

Konsekuensi dari reformasi agraria melampaui redistribusi tanah belaka; mereka mencakup transformasi sosial ekonomi yang lebih komprehensif. Penelitian empiris menunjukkan bahwa distribusi lahan yang adil memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan, karena pemilik tanah

yang lebih kecil sering memanfaatkan tanah mereka dengan cara yang lebih efisien daripada perusahaan pertanian yang lebih besar (Khan, Shakoor and Ali, 2020). Selain itu, hubungan antara distribusi tanah dan pembangunan ekonomi rumit, dengan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang tidak merata dapat melanggengkan kemiskinan dan menghalangi kemajuan ekonomi (Azadi and Vanhaute, 2019). Misalnya, studi empiris telah menunjukkan bahwa negara-negara yang dicirikan oleh ketidaksetaraan tanah yang jelas cenderung mengalami pembangunan ekonomi yang lamban dan kerusuhan sosial yang meningkat, karena komunitas yang terpinggirkan menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya vital (Tole, 2004). Akibatnya, reformasi agraria yang efektif tidak hanya mengurangi disparitas dalam kepemilikan tanah tetapi juga menumbuhkan stabilitas ekonomi dan kohesi sosial.

### **Produktivitas dan Modernisasi Pertanian**

Produktivitas dan modernisasi pertanian merupakan elemen penting dari penerapan pertanian modern, menunjukkan keharusan untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam sistem produksi pangan. Pembauran kemajuan teknologi dalam sektor pertanian telah diakui sebagai penentu penting dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Kemampuan teknologi kontemporer memiliki potensi untuk secara nyata meningkatkan daya saing dan kualitas output pertanian sekaligus mengurangi pengeluaran, dengan penekanan pada pemahaman karakteristik regional untuk secara efektif memanfaatkan sinergi teknologi (Hajiyeva *et al.*, 2024). Selanjutnya,

penerapan inovasi pertanian, seperti pertanian presisi, telah menunjukkan kapasitas untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi mutakhir termasuk sensor dan drone, sehingga memfasilitasi manajemen sumber daya dan pengawasan tanaman yang lebih akurat (Kaur *et al.*, 2022). Transisi menuju pertanian modern ini tidak hanya melalui peningkatan produksi belaka, tapi mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mempromosikan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Selain kemajuan teknologi, lingkungan sosial ekonomi petani secara signifikan mempengaruhi proses modernisasi pertanian. Interaksi antara dinamika sosial dan output pertanian ini menekankan perlunya memasukkan strategi berorientasi masyarakat ke dalam inisiatif modernisasi pertanian. Pada akhirnya, hambatan yang terkait dengan modernisasi pertanian tidak boleh diabaikan. Isu-isu seperti akses terbatas ke sumber daya keuangan, infrastruktur yang tidak mencukupi, dan keharusan untuk pendidikan dan pelatihan di kalangan petani terus menimbulkan hambatan besar bagi implementasi pertanian kontemporer secara luas. Seperti studi yang dilakukan pada beberapa negara berkembang yang memperlihatkan penerapan terbatas teknologi yang ditingkatkan di negara berkembang merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan produktivitas pertanian (Toth, Rabek and Strapekova, 2020). Mitigasi tantangan ini menuntut strategi komprehensif yang mencakup intervensi kebijakan, investasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian, serta pembentukan jaringan pendukung bagi petani. Dengan menumbuhkan lingkungan yang mempromosikan

inovasi dan kolaborasi, akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan mengamankan ketersediaan pangan dalam lingkup global yang semakin kompleks.

### **Migrasi dan Urbanisasi Pedesaan-Perkotaan dalam kaitannya dengan pertanian dan industrialisasi**

Migrasi pedesaan dan perkotaan merupakan fenomena penting yang merangkum transformasi sosial ekonomi yang luas, terutama dalam kerangka kemajuan pertanian dan industri. Migrasi ini sering terjadi ketika individu dan keluarga mengejar prospek ekonomi yang ditingkatkan, kondisi kehidupan yang unggul, dan aksesibilitas yang lebih besar ke layanan yang disediakan oleh daerah perkotaan secara konvensional. Interaksi antara efisiensi pertanian dan kemajuan industri merupakan bagian integral untuk memahami dinamika migrasi pedesaan-perkotaan. Ketika metodologi pertanian berkembang dan menjadi semakin efisien, permintaan tenaga kerja di daerah pedesaan dapat berkurang, sehingga memberi insentif kepada pekerja untuk pindah ke pusat perkotaan dalam mengejar peluang kerja dalam sektor industri yang sedang berkembang (Asfaha and Jooste, 2006; Zhang *et al.*, 2020). Migrasi ini tidak hanya mengubah komposisi demografis tetapi juga memberikan konsekuensi yang signifikan bagi ekonomi pedesaan dan perkotaan.

Interaksi antara produktivitas pertanian dan fenomena migrasi pedesaan-perkotaan secara inheren beragam. Peningkatan efisiensi pertanian dapat menghasilkan surplus tenaga kerja di daerah pedesaan, karena jumlah pekerja yang berkurang cukup untuk

menghasilkan jumlah makanan yang setara. Surplus tenaga kerja seperti itu sering memotivasi individu untuk mengejar peluang kerja di sektor perkotaan, sehingga memfasilitasi proses urbanisasi (Asfaha and Jooste, 2006; Zhang *et al.*, 2020). Sebaliknya, ketika daerah pedesaan mengalami revitalisasi melalui strategi kemajuan pertanian, tapi tidak terbatas pada peningkatan irigasi atau diversifikasi tanaman, maka memiliki kapasitas untuk mempertahankan angkatan kerja mereka dan mengurangi tekanan migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dapat secara signifikan mempengaruhi pengelolaan pola migrasi dan promosi pembangunan pedesaan, sehingga mendorong stabilitas dalam masyarakat pedesaan dan menjaga warisan budaya mereka (Selelo, Mokoele and Mnisi, 2023).

Industrialisasi semakin memperumit wacana seputar migrasi pedesaan dan perkotaan. Ketika daerah perkotaan telah berkembang dan sektor industri telah berkembang pesat, maka menjadi daya tarik bagi migran pedesaan untuk mengejar peningkatan upah dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Migrasi ini dapat mengakibatkan kepadatan kota, peningkatan tekanan pada infrastruktur yang ada, dan meningkatnya persaingan untuk peluang kerja, yang selanjutnya dapat memperburuk kesenjangan sosial ekonomi (Nweke, 2019; Tumwesigye *et al.*, 2021). Meskipun demikian, industrialisasi secara bersamaan menimbulkan peluang baru bagi migran pedesaan, karena daerah perkotaan sering menawarkan upah yang lebih unggul dan peningkatan keamanan kerja relatif terhadap pekerjaan pertanian pedesaan (Asfaha and Jooste, 2006; Tumwesigye *et al.*, 2021).

Tantangan kritis terletak pada memastikan bahwa pusat-pusat kota memiliki kapasitas untuk mengakomodasi arus migrasi ini tanpa mengorbankan kualitas hidup bagi migran baru dan penduduk yang ada (Nweke, 2019).

### **Tantangan Perdagangan dan Kebijakan**

Tantangan perdagangan dan kebijakan industri cukup beragam dan terhubung dengan dinamika ekonomi global, kerangka peraturan, dan ketegangan geopolitik. Salah satu tantangan utama dalam bidang perdagangan dan kebijakan industri berkaitan dengan pengaruh besar yang diberikan oleh perusahaan multinasional yang tangguh dan kelompok lobi industri pada proses perumusan kebijakan. Organisasi-organisasi ini sering mengeksploitasi pengaruh ekonomi mereka untuk membentuk perjanjian perdagangan dan peraturan dengan cara yang menguntungkan bagi kepentingan mereka, kadang-kadang merugikan standar kesehatan masyarakat dan lingkungan. Misalnya, konvergensi kebijakan perdagangan dan kesehatan telah menjelaskan bagaimana perjanjian perdagangan dapat menghambat inisiatif nasional yang bertujuan mengatur produk yang merusak, seperti tembakau dan makanan olahan, akibatnya merusak tujuan kesehatan masyarakat (Garton, Swinburn and Thow, 2022). Dinamika ini menyoroti keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak mendukung praktik yang merugikan.

Selain itu, eskalasi kebijakan proteksionis dan politisasi hubungan perdagangan menghadirkan hambatan besar bagi kerangka perdagangan multilateral. Perkembangan geopolitik kontemporer,

termasuk pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina, telah meningkatkan ketegangan yang sudah ada sebelumnya, menghasilkan lanskap perdagangan global yang lebih terputus-putus. Negara-negara semakin menerapkan strategi proteksionis untuk melindungi industri domestik mereka, yang dapat memicu tindakan pembalasan dan selanjutnya merusak perdagangan internasional (Bongardt and Torres, 2022; Garcia-Duran, Johan Eliasson and Costa, 2023). Strategi Uni Eropa dalam mengatasi kesulitan ini telah memerlukan transisi menuju kebijakan perdagangan yang lebih tegas, memprioritaskan otonomi strategis sambil berusaha untuk mendamaikan kepentingan negara-negara anggota dan sekutu global (Bongardt and Torres, 2022; Eliasson and Garcia-Duran, 2023; Weiß, 2023).

Selain pertimbangan geopolitik dan ekonomi ini, kerangka peraturan yang mengatur perdagangan menjadi semakin rumit. Perluasan langkah-langkah non-tarif (NTM) dan peraturan di luar perbatasan mempersulit hubungan perdagangan, karena negara-negara menetapkan beragam standar dan persyaratan yang dapat berfungsi sebagai penghalang perdagangan. Peraturan ini sering mencerminkan prioritas domestik, seperti konservasi lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengakibatkan ketegangan dengan komitmen perdagangan internasional (Pushkar and Badoni, 2023). Ketika negara-negara menavigasi rintangan peraturan ini, mereka harus mencari strategi untuk menyelaraskan kebijakan domestik mereka dengan standar internasional sambil menjaga kepentingan ekonomi mereka. Pembuat kebijakan semakin dihadapkan dengan keharusan untuk menanamkan keberlanjutan lingkungan dalam

perjanjian perdagangan, yang memerlukan keseimbangan bernuansa antara kemajuan ekonomi dan konservasi ekologi (Ahmed and Long, 2013; Priyono, 2023).

### **Perubahan Teknologi dan Deindustrialisasi**

Kemajuan teknologi dan proses deindustrialisasi adalah fenomena yang saling berhubungan yang sangat mempengaruhi ekonomi secara global, terutama dalam kerangka pasar maju dan negara berkembang. Hubungan antara inovasi teknologi, seperti otomatisasi dan digitalisasi, dan penurunan industri manufaktur konvensional telah muncul sebagai tema sentral dalam ilmu ekonomi. Seiring kemajuan industrialisasi, pasar tenaga kerja mengalami transformasi yang signifikan, mengakibatkan perubahan dalam dinamika tenaga kerja dan kerangka ekonomi. Misalnya, otomatisasi telah diakui sebagai elemen penting yang berkontribusi terhadap fenomena deindustrialisasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Brasil, di mana ia telah mengubah lanskap industri dan menimbulkan kekhawatiran mengenai deindustrialisasi dini (Morceiro and Guilhoto, 2023). Fenomena ini melampaui Brasil; dapat diamati dalam konteks yang beragam, termasuk China dan berbagai negara Amerika Latin, di mana kemajuan teknologi telah memicu pengurangan lapangan kerja manufaktur sebelum mencapai tingkat pendapatan yang secara khas terkait dengan ekonomi maju (Feng and Wang, 2021).

Fenomena deindustrialisasi digambarkan oleh pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi yang berorientasi pada layanan, sering disertai dengan konsekuensi sosial dan ekonomi yang

mendalam. Ketika lapangan kerja manufaktur berkurang, ada peningkatan yang signifikan dalam pekerjaan di sektor jasa, berkorelasi dengan perubahan dalam dinamika pasar tenaga kerja, termasuk peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan modifikasi dalam keahlian yang diperlukan (Graña and Terranova, 2022). Transisi ini dapat memicu perbedaan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dan perubahan tuntutan pasar tenaga kerja, yang berpuncak pada meningkatnya tingkat pengangguran dan kekurangan tenaga kerja di antara individu yang kompetensinya selaras dengan manufaktur (Di Meglio *et al.*, 2018). Selanjutnya, penurunan industri tradisional sering mengintensifkan ketidaksetaraan pendapatan dan stratifikasi sosial, karena individu yang tidak dapat beradaptasi dengan peluang kerja baru menghadapi marginalisasi ekonomi (Kollmeyer, 2018). Konsekuensi dari transformasi ini sangat menonjol di daerah perkotaan yang secara historis bergantung pada manufaktur sebagai katalis ekonomi utama, mengakibatkan kerusakan perkotaan dan segudang tantangan sosial (Owusu, 2014).

Selain konsekuensi ekonomi dan sosial, proses deindustrialisasi menimbulkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan lingkungan dan kerangka kebijakan industri. Transisi menuju paradigma ekonomi yang berorientasi layanan dapat memicu degradasi lingkungan yang meningkat jika tidak diatur secara memadai, karena operasi industri sering digantikan oleh sektor jasa yang ditandai dengan pengawasan yang tidak memadai (Destek, 2021). Selanjutnya, terjadinya “deindustrialisasi prematur” — di mana

negara-negara menyaksikan penurunan manufaktur sebelum mencapai status pendapatan lanjutan — menimbulkan hambatan besar bagi pembuat kebijakan (Andreoni and Tregenna, 2021; Wan, Ajaz Kazmi and Yeewong, 2022).

Kejadian ini terutama terlihat di negara-negara seperti Afrika Selatan dan Pakistan, di mana transformasi struktural dalam perekonomian belum dipenuhi dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk membantu angkatan kerja dan industri yang terkena dampak buruk (Nazeer and Rasiah, 2016). Akibatnya, peran pemerintah dalam memfasilitasi transisi yang mulus melalui inisiatif seperti pendidikan, program pelatihan ulang, dan dukungan untuk inovasi telah muncul sebagai hal penting dalam mengurangi konsekuensi merugikan yang terkait dengan deindustrialisasi (de Oliveira and da Fonseca Nicolay, 2022).

Peristiwa deindustrialisasi di seluruh dunia semakin diperumit oleh dinamika globalisasi dan perdagangan internasional. Relokasi lapangan kerja manufaktur ke negara-negara yang ditandai dengan berkurangnya biaya tenaga kerja telah meningkatkan tekanan kompetitif dan berkontribusi secara signifikan terhadap erosi sektor industri domestik di negara-negara maju (Graña and Terranova, 2022). Akibatnya, banyak negara maju menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan fondasi manufaktur mereka, mendorong seruan mendesak untuk reindustrialisasi dan integrasi teknologi Industri 4.0 untuk meremajakan lanskap ekonomi mereka (Lampón *et al.*, 2022). Interaksi antara transformasi teknologi, globalisasi, dan

deindustrialisasi menekankan perlunya strategi holistik yang mengatasi dampak ekonomi langsung dan modifikasi struktural yang bertahan lama dalam ekonomi global (Andreoni and Tregenna, 2020; Ferretti, Mariani and Sarti, 2022).

# BAB 4

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

### A. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEMBANGUNAN

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk mengelola perekonomian negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sedangkan kebijakan moneter mengacu pada pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Dalam konteks Indonesia, peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan menghindari resesi ekonomi yang lebih dalam.

Dalam Bab ini akan mengulas kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia saat ini, manfaat yang ditawarkan, serta tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Analisis ini juga akan mencakup data terbaru dan studi kasus yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan fiskal dan moneter ini dalam mengatasi ancaman resesi. (Bank Indonesia. 2012)

## 1. Kebijakan Fiskal

Pengertian Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga pengeluaran dan pemasukan keuangan negara. Pemasukan yang diatur utamanya adalah dari sektor pajak, sedangkan pengeluarannya berupa anggaran yang disalurkan untuk menunjang program pemerintah/belanja negara, kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk memperoleh tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen pemerintah, utang piutang, perpajakan, dan belanja pemerintah, sehingga seringkali Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran karena semua instrument kebijakan fiskal terdapat pada kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia, lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan fiskal itu adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi.

- a. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
- e. Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- f. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan.

Adapun Tujuan dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Menjaga stabilitas dan mengembangkan kondisi perekonomian negara, baik korporasi, perbankan, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM);
- b. Menjaga stabilitas harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat; dan
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi bagi para pelaku pasar modal, terutama investor.

Dengan demikian, negara dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak maupun pendapatan negara lainnya. Untuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan

menggunakan berbagai instrument yaitu :

**a. Anggaran belanja seimbang**

Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang, anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran surplus akan digunakan dalam masa inflasi.

**a. Stabilitas anggaran otomatis**

Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relative dari berbagai program kegiatan.

**b. Pengelolaan anggaran**

Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran.

**c. Pembiayaan fungsional**

Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja.

**2. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal**

Kebijakan Fiskal terdiri dari dua jenis yaitu kebijakan fiskal ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*) dan kebijakan fiskal kontratif (*Contractionary Fiscal Policy*). Kebijakan fiskal ekspansif, yakni kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi

melemah, penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Di sisi lain, pemerintah meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi target pajak, termasuk pemberian insentif. Tujuan pemberlakuan kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu contohnya adalah ketika pandemi tahun 2020-2021. BKF Kemenkeu menetapkan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan anggaran belanja negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal kontraktif, yakni kebijakan untuk menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara dengan diikuti menaikkan target pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Contohnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi sebesar 35 persen khusus bagi orang berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan, perbedaan kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif adalah:

- Kebijakan fiskal ekspansif mengakibatkan masyarakat mempunyai nominal uang lebih banyak sehingga daya konsumsi meningkat. Pada kebijakan fiskal ekspansif ini, pemerintah akan melakukan dua cara untuk mencapai tujuan, yakni meningkatkan keluarnya anggaran dan mengurangi tarif pajak. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif juga merujuk pada teori *trickle down*, yaitu penurunan Pajak

Penghasilan (PPh) agar memberikan kesempatan untuk pengusaha menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

- Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi keluarannya anggaran. Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat situasi perekonomian disuatu negara mengalami tekanan inflasi tinggi.
- Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik dan sehat. Kebijakan ini dibutuhkan selama proses kontraksi siklus ekonomi di suatu negara. Khususnya saat Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan permintaan konsumen, mengurangi pengangguran, hingga menghindari resesi. Sedangkan, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi guna mengurangi ketimpangan sosial dan sebagainya.

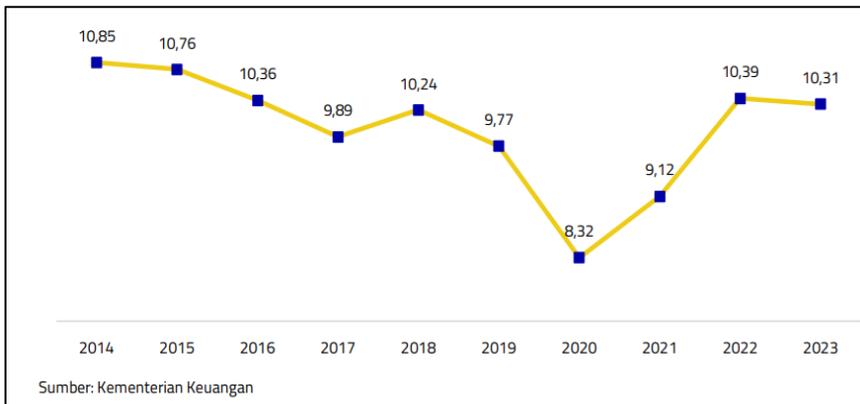
### **3. Kinerja Makro Fiskal Tahun 2014-2023**

Kebijakan Makro Fiskal terus diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui kebijakan fiskal terlihat pada kinerja makro fiskal dan capaian pembangunan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai stabilisator, APBN tidak terlepas dari siklus ekonomi. Pada tahapan siklus bisnis, anggaran negara berperan baik di fase ekspansi maupun kontraksi untuk merespons fluktuasi ekonomi. Perhitungan keseimbangan umum secara nominal belum mampu menangkap respons APBN yang sesungguhnya terhadap siklus bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menggambarkan respons terhadap kondisi ekonomi sesungguhnya melalui *Cyclically Adjusted Primary Balance (CAPB)*. Dalam perhitungannya, CAPB mempertimbangkan stabilisasi ekonomi yang lebih baik karena metode ini memisahkan pengeluaran dari pendapatan siklikal dan memungkinkan automatic stabilizer beroperasi secara bebas. Pengukuran ini juga memberikan panduan operasional yang lebih baik karena dapat dikendalikan oleh pemerintah (perubahan dalam defisit yang disesuaikan secara siklikal lebih dekat dengan upaya diskresi fiskal yang dilakukan). Melalui pendekatan ini, respons Pemerintah dapat digambarkan apakah procyclical (mengikuti siklus bisnis) atau countercyclical (berlawanan dengan siklus bisnis).

APBN selama 10 tahun terakhir tidak selamanya memiliki posisi countercyclical (fiscal stance yang ideal). Sejak tahun 2014, arah kebijakan fiskal beberapa kali mengikuti siklus bisnis, sehingga meskipun output gap negatif, kebijakan fiskal Indonesia cenderung kontraktif dan ekspansif ketika mengalami output gap positif. Namun di masa pandemi, utamanya tahun 2020, kebijakan fiskal Indonesia tercatat ekspansif yang ditandai dengan positif

fiscal impulse, yaitu pelebaran defisit keseimbangan primer sampai -3,8 persen yang ditujukan untuk merespons output gap yang negatif akibat kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal perlu terus diarahkan untuk countercyclical agar tujuan APBN sebagai stabilisator dan shock absorber dapat berjalan dengan optimal.

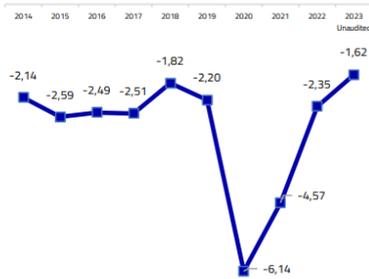


Gambar 4.1 Rasio Perpajakan ,Tahun 2014 – 2023 ( dalam %)

Kinerja perpajakan selama sepuluh tahun terakhir cenderung fluktuatif. Dalam periode 2014 – 2020 rasio perpajakan menunjukkan tren penurunan di mana rasio perpajakan yang awalnya 10,85 persen turun ke titik terendah pada tahun 2020 sebesar 8,32 persen (Gambar 4.1). Penurunan ini utamanya diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menimbulkan gejolak pada perekonomian global maupun domestik. Dalam periode 2021 – 2023, rasio perpajakan memperlihatkan tren meningkat yang dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas utama Indonesia seperti migas, Crude Palm Oil (CPO), serta mineral dan

batu bara (minerba). Selain itu, kebijakan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga membawa dampak positif pada peningkatan penerimaan perpajakan.

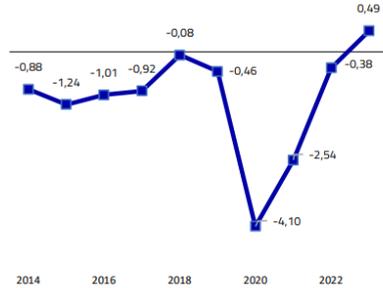
Capaian rasio defisit anggaran dan keseimbangan primer terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir terjaga dalam batas aman, meski sempat tertekan cukup dalam. Dalam periode 2014 – 2019, defisit anggaran terjaga berada di kisaran 2 persen PDB dan keseimbangan primer menuju ke level nol persen PDB. Namun, pandemi Covid-19 di awal 2020 mengakibatkan Pemerintah merelaksasi batasan defisit anggaran menjadi lebih dari tiga persen PDB. Dukungan APBN terhadap PEN sebagai respons terhadap pandemi mengakibatkan APBN mengalami Keseimbangan Primer dan Defisit masing masing sebesar -4,10 dan -6,14 persen PDB (Gambar 4.2 dan Gambar 4.3). Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, defisit anggaran dapat kembali ke level di bawah 3 persen PDB pada tahun 2022. Pada tahun 2023, APBN kembali mencatatkan kinerja positif berupa keseimbangan primer yang bernilai positif akibat kinerja penerimaan yang cukup positif.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 4.2

Perkembangan Defisit Anggaran, Tahun 2014-2023 (dalam % PDB)

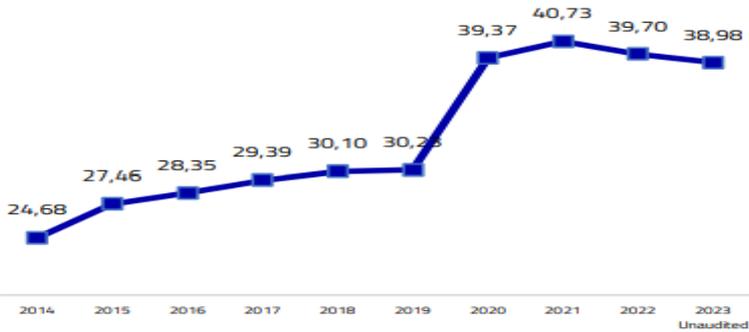


Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 4.3

Perkembangan Keseimbangan Primer. Tahun 2014-2023 (dalam % PDB)

Rasio utang terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam periode 2014-2019, rasio utang secara umum meningkat namun dengan laju kenaikan cukup moderat. Namun, rasio utang meningkat 9,14 poin persen pada tahun 2020 akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program PC-PEN. Rasio utang kembali meningkat pada tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan PEN. Seiring dengan terkendalnya situasi pandemi dan perekonomian yang semakin pulih, laju kenaikan nominal utang semakin terkendali sehingga rasio utang terhadap PDB dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berada dalam tren menurun (Gambar 4.4).



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 4.4 Perkembangan Rasio Utang, Tahun 2014-2023  
(dalam % PDB)

#### 4. Kebijakan Moneter

Pengertian Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) agar tercapai kegiatan perekonomian yang diharapkan. Bank yang memegang peran bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI).

Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pada pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana yang dimaksud dengan "stabilitas nilai

Rupiah" adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

Konsep stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. (Perry Warjiyo, 2017)

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter memiliki Instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, antara lain:

- a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) yang merupakan Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi).
- b. Politik Diskonto (Discount Rate) dilakukan oleh pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
- c. Politik Cash Ratio (Reserve Requirements). Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

## 5. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Dalam literatur, terdapat dua jenis kebijakan moneter yang dimiliki oleh BI, yakni kebijakan moneter ekspansif (*Expansionary Monetary Policy*) dan kebijakan Moneter kontraktif (*Contractionary Monetary Policy*). Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar atau biasa disebut kebijakan moneter longgar. Wujud dari kebijakan moneter ekspansif adalah pembelian sekuritas pemerintah oleh BI, penurunan suku bunga, serta penurunan syarat cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis dan daya beli konsumen, namun juga mampu mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk memperlambat kegiatan ekonomi di dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah uang beredar atau biasa disebut kebijakan uang ketat. Wujud dari kebijakan moneter kontraktif adalah penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga, serta peningkatan syarat cadangan untuk bank.

## 6. Kerangka Kebijakan Moneter

Kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah *Inflation Targeting Framework* (ITF) yaitu suatu kerangka

kerja (*framework*) kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Implementasi ITF menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia - IndONIA (*Indonesia Overnight Index Average*) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara resmi sejak 1 Juli 2005. (Perry Warjiyo, 2017)

Penetapan sasaran Inflasi yang eksplisit dan diumumkan secara transparan, Bank Indonesia akan memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, dengan menerapkan kerangka kerja ITF yang konsisten dan transparan, Bank Indonesia juga meningkatkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan moneter. Pengalaman krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 mengajarkan pentingnya fleksibilitas bagi bank sentral dalam merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bank Indonesia Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible* ITF. (Bank Indonesia, 2009)

Flexible ITF adalah pengembangan dari kerangka kerja kebijakan moneter ITF yang dibangun dengan tetap mempertahankan elemen-elemen penting ITF. *Flexible* ITF merupakan kebijakan

bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Kerangka *Flexible* ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu:

1. Strategi penargetan inflasi (*Inflation Targeting*) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.
2. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.
3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi makin signifikan. Hal ini

tercermin dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009. Hal ini menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk pencapaian stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan (*necessary but not sufficient*). Pasca krisis keuangan global tahun 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Untuk itu, keberhasilan penerapan ITF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro (*macroprudential regulatory framework*). Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Flexible ITF adalah kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Dimana Penerapan Flexible ITF dilakukan melalui ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan.

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (inflation targeting), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini merupakan implikasi dari adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter sehingga target dalam pelaksanaan kebijakan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respons bauran kebijakan (policy mix) dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. (Arestis, P., 2015)

Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menetapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan dengan instrumen moneter 12 bulan. Dengan penetapan BI 7DRR sebagai suku

bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya. Reformulasi kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama yaitu:

1. Memperkuat sinyal arah kebijakan moneter.
2. Memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
3. Mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Dalam implementasinya, reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip.

1. Reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF.
2. Reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh.
3. Reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia.
4. Penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7DRR berada dalam satu

struktur suku bunga (*term structure*) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan Sasarannya.

Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, terutama dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah fokus untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang aktif di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah koordinasi dan rekomendasi diberikan untuk memantau serta memelihara stabilitas sistem keuangan secara terus-menerus. Mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai *stance* kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi *reverse repo* Bank Indonesia tenor 7 (tujuh) hari.

## **7. Transmisi Kebijakan Moneter**

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, yang salah satunya

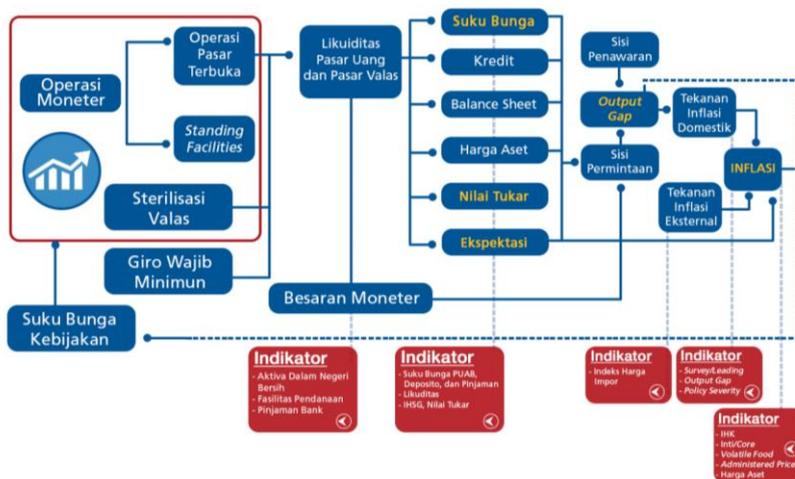
tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi. Namun, dalam proses transmisi kebijakan moneter tersebut, terdapat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran inflasi melalui berbagai *channel* dan memerlukan waktu (*time lag*). Setiap *channel* transmisi kebijakan moneter memiliki *time lag* yang berbeda-beda.

Pada kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI-Rate dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun, jika perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, maka respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-Rate akan lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat jika prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.

Transmisi kebijakan moneter pada jalur suku bunga, perubahan BI-Rate akan memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menerapkan

kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga akan menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan BI-Rate akan menurunkan suku bunga kredit sehingga meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Hal tersebut meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Transmisi kebijakan pada jalur nilai tukar melalui perubahan suku bunga BI-Rate akan mempengaruhi nilai tukar. Jika BI-Rate naik, maka akan meningkatkan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Hal tersebut akan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing tersebut kemudian akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi nilai tukar Rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih murah, sementara harga barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga dapat mendorong impor dan mengurangi ekspor. Adanya apresiasi rupiah kemudian akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.5 Transmisi Kebijakan Moneter

Perubahan suku bunga BI-Rate juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah

yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

## **8. Transparansi dan Akuntabilitas**

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang tersebut.

Namun, Independensi Bank Indonesia harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengaturan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia makin dipertegas sebagaimana tertuang dalam UU tersebut pasal 58 bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

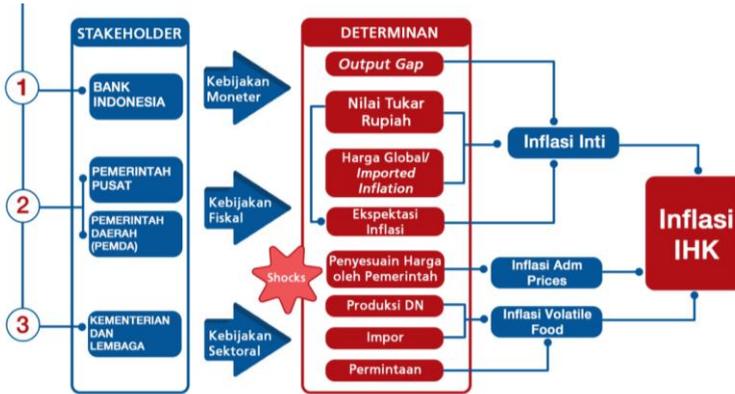
Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan. Bagian laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat: evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indoensia pada tahun sebelumnya serta rencana kebijakan dan

penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang. Terkait anggaran, Bank Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa paling lambat 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

## **9. Koordinasi Pengendalian Inflasi**

Pengendalian inflasi sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Inflasi yang stabil dan rendah sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan kebijakan makro. Namun, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga berasal dari sisi penawaran, yaitu berkaitan dengan produksi dan distribusi barang. Selain itu, tekanan terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait dengan barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok administered price (kelompok barang yang harganya diatur oleh Pemerintah) seperti harga BBM dan komoditas energi lainnya. Sehingga, untuk dapat mencapai tujuan kebijakan makro, maka diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan Pemerintah bekerja sama dengan membentuk Tim Pengendalian

Inflasi (TPI). TPI di level pusat terbentuk sejak tahun 2005, kemudian diperkuat dengan pembentukan TPI di level daerah sejak tahun 2008.



Sumber : Banbk Indonesia

Gambar 4.6 Koordinasi Pengendalian Inflasi

Kerja sama tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola ekspektasi inflasi, serta pengelolaan penawaran diantaranya pengelolaan terhadap pasokan, distribusi barang, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi. Koordinasi pengendalian inflasi diperkuat dengan landasan hukum berupa Perpres No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Ada tiga tim yang terbentuk dari TPIN, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan

langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di didaerah.

Produk turunan dari dasar hukum ini selanjutnya ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.500.05-8135 Tahun 2017. Program pengendalian inflasi difokuskan pada 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Bank Indonesia bersama dengan TPIP & TPID terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional, termasuk dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

## **B. PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI ASING**

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan internasional telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem ekonomi global. Salah satu manfaat dari perdagangan internasional adalah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi negara eksportir, sehingga kondisi akan

memungkinkan terciptanya skala ekonomi yang lebih besar, yang menyebabkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. (Salvatore,2007) Perdagangan internasional juga dapat meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan negara, jika terjadi peningkatan perdagangan internasional, sumber pendapatan negara tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi terbagi di berbagai sektor ekonomi, sehingga membuat negara menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas atau gejolak di pasar internasional. Sebagai contoh, jika harga minyak dunia turun, maka Indonesia masih bisa mengandalkan pendapatan dari sektor pertambangan lainnya, seperti batu bara atau minyak kelapa sawit. Diversifikasi pendapatan negara ini dapat memberikan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan baru bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat memperoleh teknologi produksi yang lebih canggih, serta akses terhadap pengetahuan dan keterampilan baru dari negara lain. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Di samping itu, melalui perdagangan internasional, Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman dan praktik terbaik di negara lain dalam hal pengelolaan perekonomian dan kebijakan perdagangan.

### **1. Teori Perdagangan Internasional**

Konsep perdagangan internasional sudah muncul sejak abad ke tujuh belas dan delapan belas mengenai filosofi ekonomi yang disebut merkantilisme. Menurut teori tersebut bahwa satu-

satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor (Salvatore, 2003).

Terdapat beberapa teori terkait perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut:

**a. Teori keunggulan absolute**

Menurut Adam Smith perdagangan dua negara didasarkan kepada keunggulan absolut (*Absolute advantage*), yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditas, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditas lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan dengan komoditas lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan menjadi meningkat.

**b. Teori Keunggulan Komparatif**

Menurut David Ricardo meskipun suatu negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut) dengan negara lain dalam memproduksi dua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, dan

mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar.

**c. Teori Proporsi Faktor Produksi**

Menurut Heckscher Ohlin terdapat dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi.

**d. Teori keunggulan kompetitif**

Menurut Michael E. Porter dalam teori *The Competitive Advantage of Nation*, bahwa tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi (sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi daya saing dalam perdagangan. Terdapat empat atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional, yaitu: 1) Kondisi faktor produksi, 2) Kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri, 3) Eksistensi industri pendukung, 4) Kondisi persaingan strategi dan struktur perusahaan dalam negeri.

## 2. Kebijakan Perdagangan Internasional

Di era globalisasi, perdagangan internasional menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi dunia. Negara-negara saling terhubung melalui arus barang, jasa, dan modal, menciptakan peluang dan tantangan bagi para pelaku bisnis. Untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan antar negara, diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional. Pada hakekatnya Kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian aturan, regulasi, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pertukaran barang, jasa, dan modal dengan negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Salvatore, ,2007)

Kebijakan perdagangan internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a. Kebijakan Perdagangan Proteksionis: Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri dengan menerapkan tarif, kuota, atau hambatan perdagangan lainnya.
- b. Kebijakan Perdagangan Bebas: Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perdagangan antar negara dengan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota.

Adapun Jenis-Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Berikut beberapa contohnya:

- a. Tarif: Pajak yang dikenakan pada barang impor untuk meningkatkan harga dan melindungi industri domestik.
- b. Kuota: Batasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke suatu negara dalam periode tertentu.
- c. Subsidi: Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada industri domestik untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.
- d. Embargo: Larangan perdagangan dengan negara tertentu sebagai bentuk sanksi atau tekanan politik.
- e. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA): Kesepakatan antar negara untuk menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan antar mereka.
- f. Persetujuan Perdagangan dan Investasi (ITA): Kesepakatan yang mengatur perdagangan barang, jasa, dan investasi antar negara.

Kebijakan perdagangan internasional diberlakukan dengan berbagai tujuan, antara lain:

- a. Melindungi Industri Domestik: Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri yang lebih kuat, terutama industri yang baru berkembang.
- b. Meningkatkan Pendapatan Negara: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan tarif dan bea masuk impor.
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan perdagangan dan investasi.

- d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses kepada barang dan jasa yang lebih murah dan beragam.
- e. Meningkatkan Daya Saing Negara: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara di pasar internasional dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Kebijakan perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, antara lain:

- a. Meningkatkan Perdagangan dan Investasi: Kebijakan perdagangan bebas dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan Daya Saing: Persaingan di pasar internasional mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya, sehingga meningkatkan daya saing mereka.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Konsumen memiliki akses kepada barang dan jasa yang lebih murah dan beragam, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan perdagangan internasional juga dapat memiliki dampak negatif, seperti:

- a. Hilangnya Lapangan Kerja: Industri domestik yang tidak kompetitif mungkin kehilangan pangsa pasarnya dan berakibat pada hilangnya lapangan kerja.

- b. Kesenjangan Ekonomi: Kebijakan perdagangan bebas dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang.
- c. Kerusakan Lingkungan: Peningkatan perdagangan dapat meningkatkan eksploitasi sumber daya alam dan memperparah kerusakan lingkungan.

### **Contoh Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Berbagai Negara**

Berikut beberapa contoh implementasi kebijakan perdagangan internasional di berbagai negara:

1. Uni Eropa merupakan contoh nyata dari implementasi kebijakan perdagangan bebas. Negara-negara anggota Uni Eropa telah menghapus hambatan perdagangan antar mereka, menciptakan pasar tunggal yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Amerika Serikat menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis untuk melindungi industri domestiknya. Contohnya, Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi untuk impor baja dan aluminium dari China.
3. China menerapkan strategi perdagangan bebas yang agresif, menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara di dunia. China telah menjadi salah satu negara eksportir terbesar di dunia.
4. Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan bebas selektif, membuka pasarnya untuk produk-produk tertentu dari negara lain sambil melindungi industri domestiknya di sektor-sektor

tertentu. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas regional, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

### **3. Peran Investasi Asing**

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak terlepas dari penanaman modal. Peran penanaman modal sendiri bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi maupun infrastruktur terutama bagi negara berkembang. Dimana hal ini dituntut untuk meningkatkan produksi dan infrastrukturnya guna mendorong peningkatan ekonomi. Penanaman modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri (Alba, Joseph D., dkk.2009). Penanaman modal yang diberikan dapat berupa portofolio maupun modal langsung. Penanam modal atau investor sebelum menanamkan modalnya tentu melihat prospek negara tempat dimana akan menanamkan modalnya. Dimana selaku penanam modal mereka tidak mau mengambil resiko jika di masa depan negara tempat dimana ditanamkan modalnya mengalami krisis. Penanaman modal asing diperlukan untuk membangun percepatan ekonomi. Hal ini dikarenakan modal asing dapat membantu dalam proses industrialisasi agar menciptakan kesempatan yang lebih luas. Modal asing yang diberikan tidak hanya melalui bantuan dana tetapi dapat berupa bantuan teknologi (Jhingan,2012). Masuknya investasi langsung (direct investmen) diharapkan dapat menjadi sumber

pembiayaan pembangunan karena negara tidak dapat lagi mengandalkan pembiayaan dari sektor migas yang menjadi primadona dan juga belum dapat mengandalkan dari sektor pajak karena keengganan dari masyarakat mencermati tidak signifikannya pemasukan negara dari sektor pajak dengan pembangunan sarana infrastruktur yang menjadi indikasi utama penanaman modal publik (publik investment) yang dilakukan oleh negara.

#### **4. Penanaman Modal Asing**

Investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) sangat bergantung pada elemen-elemen pendukung yang terdapat dalam suatu negara sebagai tolak ukur keberlangsungan dan berjalannya iklim investasi yang kondusif sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Berikut ini teori para ahli yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA).

##### **a. Teori Alan M. Rugman**

Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ; Ekonomi, non Ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi merupakan elemen paling penting yang menjadi perhatian bagi para penanam modal. Sedangkan variabel non ekonomi mencakup kondisi sosial, budaya dan masyarakat dalam suatu negara. Sementara pemerintah akan selalu diperhatikan oleh investor karena kondisi politis suatu

negara akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Sementara variabel lainnya adalah internalisasi yakni keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

**b. Teori Jhon Dunning**

Teori ini merumuskan persyaratan yang terdiri dari tiga hal bila sebuah perusahaan ingin berkecimpung dalam penanaman modal asing. Pertama, keunggulan perusahaan yang terdiri dari; teknologi pemilikan, penelitian, pengembangan, keterampilan manajerial, pemasaran, organisasi perusahaan, diferensiasi produk, merek dagang, nama, ukuran besar yang memerlukan skala ekonomi dan keperluan modal. Kedua, keunggulan internalisasi dengan asumsi kondisi paragraf diatas terpenuhi. Kondisi yang mendukung internalisasi meliputi; biayanya tinggi dalam membuat kontrak, ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga. Ketiga, keunggulan spesifik negara meliputi; sumber daya alami, kekuatan tenaga kerja biaya rendah dan efisien serta rintangan perdagangan membatasi impor.

**c. Teori David K. Eiteman**

Teori ini menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing didasari atas tiga motif, yaitu; Motif strategi, motif perilaku dan motif ekonomi.<sup>9</sup> Motif perilaku merupakan motif yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan dan

organisasi sementara motif ekonomi merupakan motif mencari keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

## 5. Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

Landasan hukum penanaman modal asing di Indonesia adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing, maka pemerintah telah melakukan sejumlah reformasi kebijakan investasi. Salah satu langkah penting adalah pengesahan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. UU Cipta Kerja juga membuka lebih banyak sektor bagi investasi asing, termasuk beberapa sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi. Namun, beberapa sektor strategis seperti pertahanan dan media massa tetap memiliki pembatasan kepemilikan asing. Pemerintah akan terus mendorong promosi terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia, dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan *competitive advantage* dari peluang investasi di

tanah air. Selain itu, INA (*Indonesia Investment Authority*) juga membuka peluang investasi terutama terkait proyek infrastruktur untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

### **C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN URBANISASI**

Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 4,73 persen yang masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025 . Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian *milestones* proyek prioritas.(BPS, 2015)

#### **1. Pembangunan Infrastruktur**

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur pada era reformasi. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan, menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama di era reformasi adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol. Sebagai

contoh, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru. (Laporan Kinerja PUPR, 2022)

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya seperti energi, telekomunikasi, dan air. Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global. Investasi sektor swasta juga telah meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap lingkungan bisnis yang lebih kondusif. (World Bank, 2023) Fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di Indonesia. Ini menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendatangkan modal asing,

dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan karena Pembangunan infrastruktur menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja.

## **2. Perkembangan Urbanisasi di Indonesia**

Urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, telah menjadi tren global yang signifikan. Fenomena ini membawa berbagai dampak, termasuk pertumbuhan populasi kota yang cepat, peningkatan permintaan akan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik. Arus urbanisasi tidak terjadi serta-merta begitu saja, pastinya ada faktor yang menjadi alasan arus urbanisasi tersebut terjadi. Beberapa faktor penyebab terjadinya urbanisasi antara lain :

- a) Gemerlapnya kehidupan kota yang megah dan lebih modern daripada di desa, menjadi impian setiap warga desa yang ingin hidup di kota.
- b) Sarana dan prasarana kehidupan dikota yang mudah untuk diakses dan lebih lengkap menjadi nilai lebih bagi perkotaan.
- c) Dengan beragamnya bidang pekerjaan, secara otomatis memberikan Banyak pilihan lapangan pekerjaan di kota bagi individu untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.
- d) Karena sifat sentralistiknya, dikota pun banyak tempat pendidikan sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki kualitas lebih baik dan tak kalah dengan yang ada di luar negeri. Selain bekerja, tak sedikit kaum urban juga berorientasi melanjutkan pendidikannya.

Dengan adanya peningkatan penduduk yang terpusat di sebuah kota maka pusat perekonomian pun akan terpusat dikota, sehingga di kota tempat para urbanisasi akan timbul masalah-masalah sosial lain bagi kaum urban. Berikut ini terdapat beberapa dampak urbanisasi, terdiri atas:

- a) Terbentuknya sub-sub urban yang tinggal mengelompok di tempat pemukiman baru dipinggiran kota.
- b) Meningkatnya permasalahan di kota dengan banyaknya tuna karya (orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan gaji tetap).

- c) Permasalahan pada sektor perumahan yang sempit, tidak teratur dan tidak layak huni sebagai syarat rumah yang memenuhi standart kesehatan.
- d) Pola hidup tidak sehat dan lingkungan yang kumuh, juga tak luput munculnya tindak kejahatan dan beragam kerentan dalam hubungan social serta kemanan social, dikarenakan banyaknya actor baru tindak kriminal.

Menurut laporan dari Bank Dunia mengenai pertumbuhan urbanisasi Indonesia selama 10 tahun terakhir, pertumbuhannya dinilai lambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Lambatnya pertumbuhan urbanisasi dikarenakan wilayah Indonesia yang imbang antara perkotaan dan pedesaan. Pada 2020, populasi Indonesia yang tinggal di perkotaan meningkat hingga 56,7 persen dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi populasi yang tinggal diperkotaan dari tahun ke tahun akan meningkat. Persentase Penduduk daerah Perkotaan Hasil Proyeksi BPS hingga tahun 2035 diperlihatkan pada gambar 4.7.



Sumber : BPS

Gambar 4.7 Proyeksi Urbanisasi Di Indonesia Tahun 2015 - 2030

Populasi di kota-kota urban di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Jakarta masih menjadi kota dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 10,8 juta orang, dan populasi terbanyak berada di kota Jakarta yang mencapai 10,8 juta orang kemudian Populasi kota Bekasi mencapai 3,4 juta orang dan masuk pada posisi kedua kota urban yang padat di Indonesia, dan selanjutnya Kota Surabaya mencapai 2,9 juta orang, Kota Bandung mencapai 2,6 juta orang, kota Tangerang mencapai 2,3 juta orang dan Medan mencapai 2,3 juta orang. (BPS, 2021).

Pada hakekatnya Urbanisasi dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, namun, tanpa manajemen yang baik, dapat menimbulkan masalah sosial,

ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak urbanisasi dan memastikan bahwa kota-kota berkembang secara seimbang dan inklusif oleh sebab itu Pemerintah di berbagai negara dihadapkan dengan tugas yang tidak ringan untuk mengelola urbanisasi agar berjalan secara berkelanjutan. Beberapa upaya yang biasanya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah urbanisasi antara lain :

- a) **Perencanaan Tata Ruang Kota** : Pemerintah perlu merancang perencanaan tata ruang yang baik untuk mengatasi pertumbuhan yang cepat di kota. Pembangunan kota yang terorganisir dengan baik dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, memastikan aksesibilitas layanan dasar, dan mendukung pembangunan ekonomi.
- b) **Infrastruktur yang Berkualitas** : Investasi dalam infrastruktur yang memadai sangat penting. Pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, air bersih, dan sistem sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c) **Perumahan Terjangkau** : Masalah perumahan seringkali muncul seiring dengan urbanisasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada penyediaan perumahan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk berpenghasilan rendah.
- d) **Pengembangan Kawasan Pedesaan** : Selain mengelola pertumbuhan kota, pemerintah juga dapat mengembangkan

kawasan pedesaan untuk mencegah migrasi besar-besaran ke kota. Inisiatif ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar di pedesaan.

- e) **Pendidikan dan Keterampilan** : Pemerintah dapat mengatasi masalah urbanisasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduk. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang baik, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja lokal, mengurangi tekanan migrasi ke kota.
- f) **Pengelolaan Lingkungan dan Pelestarian Ruang Terbuka** : Dalam upaya menghindari dampak negatif urbanisasi terhadap lingkungan, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ketat dan melestarikan ruang terbuka hijau di dalam kota.
- g) **Partisipasi Masyarakat** : Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi kunci keberhasilan upaya mengatasi urbanisasi. Pemerintah dapat membangun dialog terbuka dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.
- h) **Teknologi untuk Meningkatkan Layanan Publik** : Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik di kota. Sistem informasi geografis, aplikasi pintar, dan solusi berbasis teknologi

lainnya dapat membantu pemerintah dalam merespons kebutuhan warganya dengan lebih cepat.

## BAB 5

# PROSPEK PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA MODERN

Kita hidup dalam era yang ditandai oleh perubahan yang begitu cepat dan pesat. Revolusi industri 4.0, digitalisasi, dan globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi secara fundamental. Di satu sisi, kita menyaksikan kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian geopolitik.

Prospek pembangunan ekonomi di era modern ini ibarat sebuah peta yang terus berubah. Jika di masa lalu pertumbuhan ekonomi seringkali diukur secara linier, kini kita perlu mempertimbangkan dimensi yang lebih luas. Pembangunan ekonomi tidak lagi sekadar soal meningkatkan angka pertumbuhan PDB, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, kita perlu merombak paradigma pembangunan ekonomi kita. Model lama yang berorientasi pada pertumbuhan semata sudah tidak relevan lagi. Kita perlu beralih ke model pembangunan yang lebih holistik, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ekonomi sirkular, ekonomi

hijau, dan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin relevan dalam konteks ini.

Namun, perjalanan menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks, seperti: (a) Ketidakpastian global: pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa rentannya ekonomi global terhadap guncangan. (b) Perubahan iklim: dampak perubahan iklim semakin nyata dan mengancam keberlangsungan pembangunan. (c) Ketimpangan: ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang semakin lebar dapat memicu ketidakstabilan sosial. Dan (d) Revolusi teknologi: otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat menciptakan disrupsi di pasar tenaga kerja.

Di tengah tantangan tersebut, ada juga sejumlah peluang yang terbuka lebar. Teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan inovasi baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan semakin meningkat, mendorong munculnya bisnis-bisnis yang berorientasi pada lingkungan dan sosial.

Untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan di era modern ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kita perlu membangun ekosistem inovasi yang kuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **A. DAMPAK GLOBALISASI DAN INTEGRASI EKONOMI**

Globalisasi dan integrasi ekonomi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi ekonomi dunia selama beberapa dekade terakhir. Proses ini telah menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, dan aliran teknologi. Namun, seperti halnya koin yang memiliki dua sisi, globalisasi juga membawa dampak positif dan negatif bagi pembangunan ekonomi.

### **Dampak positif globalisasi dan integrasi ekonomi**

Globalisasi dan integrasi ekonomi telah mengubah lanskap perekonomian dunia secara signifikan. Kedua fenomena ini saling terkait dan telah membawa sejumlah dampak positif bagi pembangunan ekonomi di berbagai negara. Berikut adalah beberapa di antaranya:

#### **1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi**

Globalisasi dan integrasi ekonomi telah membuka pintu bagi negara-negara di seluruh dunia untuk saling terhubung dan berinteraksi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Interaksi ini telah menciptakan dinamika baru dalam perekonomian global, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah beberapa dampak positif yang spesifik terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi:

- a. Peningkatan Investasi Asing Langsung (FDI)
  - (1) Globalisasi memudahkan aliran modal asing ke negara-negara berkembang, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pengembangan industri, dan bisnis baru.
  - (2) Investor asing seringkali membawa teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan lokal.
  - (3) Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
  
- b. Ekspansi Pasar
  - (1) Perusahaan-perusahaan dapat mengakses pasar global yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan.
  - (2) Dengan meningkatkan skala produksi, perusahaan dapat menurunkan biaya produksi per unit, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif.
  
- c. Spesialisasi dan efisiensi
  - (1) Negara-negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka kuasai, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
  - (2) Integrasi dalam rantai pasok global memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya.

- d. Kompetisi yang sehat
  - (1) Persaingan global mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.
  - (2) Untuk bertahan dalam persaingan global, perusahaan harus terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka.
- e. Transfer pengetahuan dan keahlian
  - (1) Kerjasama antara perusahaan, universitas, dan lembaga penelitian di berbagai negara memfasilitasi transfer pengetahuan dan keahlian.
  - (2) Interaksi dengan tenaga kerja asing dan akses terhadap teknologi mutakhir dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Contoh:

- a. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura telah berhasil memanfaatkan globalisasi untuk melakukan industrialisasi yang cepat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- b. Cina menjadi kekuatan ekonomi global dengan membuka pasarnya bagi investasi asing dan mendorong ekspor produk manufaktur.

2. Transfer teknologi

Transfer teknologi merupakan salah satu dampak paling signifikan dari globalisasi dan integrasi ekonomi. Proses ini

melibatkan pergerakan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi dari satu negara ke negara lain.

Dampak positif transfer teknologi akibat globalisasi adalah:

- a. Negara-negara berkembang dapat dengan cepat mengadopsi teknologi terbaru yang sebelumnya hanya tersedia di negara maju. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- b. Dengan adanya transfer teknologi, perusahaan di negara berkembang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mampu bersaing di pasar global.
- c. Transfer teknologi mendorong diversifikasi ekonomi dengan menciptakan sektor-sektor industri baru.
- d. Penerapan teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.
- e. Transfer teknologi mendorong kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, sehingga memacu pengembangan sumber daya manusia.

Mekanisme transfer teknologi dalam globalisasi:

- a. Investasi Asing Langsung (FDI): perusahaan multinasional seringkali membawa teknologi baru saat melakukan investasi di negara lain.
- b. Lisensi dan franchising: perjanjian lisensi dan franchising memungkinkan perusahaan lokal untuk menggunakan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan asing.
- c. Kemitraan strategis: kerjasama antara perusahaan lokal dan asing dapat memfasilitasi transfer teknologi.

- d. Mobilitas tenaga kerja: perpindahan tenaga kerja terampil antar negara dapat mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan.

Contoh:

- a. Industri manufaktur: banyak negara berkembang telah berhasil mengembangkan industri manufaktur mereka melalui transfer teknologi dari negara maju.
- b. Sektor teknologi informasi: negara-negara seperti India dan China telah menjadi pusat pengembangan perangkat lunak global, berkat transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan teknologi multinasional.
- c. Sektor pertanian: transfer teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul dan pupuk, telah meningkatkan produktivitas pertanian di banyak negara.

Meskipun transfer teknologi membawa banyak manfaat, namun juga terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- a. Ketergantungan teknologi: terlalu bergantung pada teknologi asing dapat menimbulkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan atau gangguan pasokan.
- b. Kesenjangan teknologi: tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama untuk menyerap dan memanfaatkan teknologi baru.
- c. Perlindungan hak kekayaan intelektual: perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan transfer teknologi.

Solusi yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Penguatan pendidikan dan penelitian: investasi dalam pendidikan dan penelitian dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menyerap dan mengembangkan teknologi.
  - b. Pembentukan pusat penelitian dan pengembangan: pusat-pusat penelitian dapat menjadi wadah untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal.
  - c. Dukungan pemerintah: pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan yang kondusif bagi transfer teknologi, seperti insentif fiskal dan kemudahan berusaha.
  - d. Kemitraan dengan perusahaan multinasional: Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan multinasional untuk mempercepat transfer teknologi.
3. Peningkatan kualitas produk dan layanan
- Globalisasi telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif di mana perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka untuk dapat bertahan dan berkembang. Berikut adalah beberapa mekanisme yang mendorong peningkatan kualitas tersebut:
- a. Persaingan Global
    - (1) Standar internasional: Untuk dapat bersaing di pasar global, perusahaan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan secara internasional. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

- (2) Inovasi: Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru dengan fitur dan kualitas yang lebih baik.
- b. Akses terhadap Teknologi
- (1) Transfer teknologi: Globalisasi mempermudah transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini memungkinkan perusahaan di negara berkembang untuk mengadopsi teknologi produksi yang lebih modern dan efisien.
- (2) R&D: Kolaborasi dengan perusahaan multinasional dapat mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang lebih intensif, sehingga menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif.
- c. Preferensi Konsumen
- (1) Konsumen yang lebih sadar: Globalisasi membuat konsumen semakin terpapar dengan berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia. Hal ini meningkatkan ekspektasi konsumen terhadap kualitas produk dan layanan.
- (2) Transparansi informasi: Informasi mengenai kualitas produk dan layanan dapat dengan mudah diakses melalui internet, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih informatif.

Mekanisme peningkatan kualitas melalui:

- a. Standarisasi: Penerapan standar kualitas internasional seperti ISO merupakan salah satu cara untuk memastikan konsistensi kualitas produk dan layanan.
- b. Sertifikasi: Sertifikasi produk dan layanan dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar kualitas tertentu.
- c. Sistem Manajemen Mutu: Penerapan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 dapat membantu perusahaan untuk secara sistematis mengidentifikasi dan memperbaiki proses produksi.
- d. Pelatihan Tenaga Kerja: Pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan.

#### 4. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi adalah strategi pembangunan yang bertujuan mengurangi ketergantungan suatu negara pada satu atau beberapa sektor ekonomi. Dengan kata lain, negara akan berusaha mengembangkan berbagai sektor ekonomi sehingga tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas atau perubahan permintaan di pasar global.

Globalisasi dan integrasi ekonomi mendorong diversifikasi ekonomi dengan cara:

- a. Akses ke pasar global yang lebih luas
  - (1) Ekspansi produk: Perusahaan-perusahaan di negara berkembang dapat mengeksport produk mereka ke pasar global yang lebih luas, sehingga tidak hanya bergantung pada pasar domestik.
  - (2) Investasi Asing Langsung (FDI): FDI dapat membawa teknologi baru dan pengetahuan yang memungkinkan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru.
  
- b. Transfer teknologi
  - (1) Adopsi teknologi baru: Negara-negara dapat mengadopsi teknologi terbaru dari negara maju, memungkinkan mereka untuk bersaing di sektor-sektor yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.
  - (2) Kemitraan strategis: Kerjasama dengan perusahaan multinasional dapat mempercepat transfer teknologi dan mendorong inovasi.
  
- c. Peningkatan keterampilan tenaga kerja
  - (1) Permintaan keterampilan baru: Globalisasi mendorong permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi, sehingga memaksa negara-negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
  - (2) Mobilitas tenaga kerja: Mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi memungkinkan pekerja memperoleh pengalaman dan keterampilan baru di luar negeri.

d. Peningkatan daya saing

- (1) Persaingan sehat: Persaingan di pasar global mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- (2) Standar internasional: Adopsi standar internasional mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan dalam negeri.

Contoh diversifikasi ekonomi yang didorong oleh globalisasi:

- a. Negara-negara penghasil minyak: Banyak negara penghasil minyak telah berupaya diversifikasi ekonomi mereka dengan mengembangkan sektor non-migas seperti pariwisata, manufaktur, dan teknologi.
- b. Negara-negara berkembang di Asia: Negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan berhasil melakukan diversifikasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan teknologi.

Manfaat diversifikasi ekonomi:

- a. Stabilitas ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dapat melindungi negara dari guncangan eksternal.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan: Diversifikasi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan adanya berbagai sektor ekonomi, peluang kerja dan pendapatan masyarakat akan lebih beragam.

## 5. Integrasi rantai pasok global

Integrasi rantai pasok global adalah salah satu manifestasi paling nyata dari globalisasi. Dimana proses produksi suatu barang atau jasa melibatkan berbagai negara, dengan setiap negara berkontribusi pada tahap produksi yang berbeda.

Dampak positif terhadap pembangunan ekonomi:

### a. Peningkatan Efisiensi:

- (1) **Spesialisasi:** Negara-negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang paling efisien, memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing.
- (2) **Pengurangan biaya:** Dengan mengoptimalkan lokasi produksi dan distribusi, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan.
- (3) **Peningkatan produktivitas:** Integrasi rantai pasok mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas agar tetap kompetitif.

### b. Akses ke pasar global

- (1) **Ekspansi pasar:** Perusahaan dapat mengakses pasar global yang lebih luas, meningkatkan skala produksi, dan meraih keuntungan yang lebih besar.
- (2) **Diversifikasi produk:** Perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih beragam kepada konsumen global.

### c. Transfer teknologi

- (1) **Kolaborasi:** Kerjasama dengan perusahaan multinasional dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan.

- (2) Inovasi: Interaksi antara perusahaan-perusahaan di berbagai negara mendorong munculnya inovasi baru.
- d. Peningkatan kualitas produk
- (1) Standar internasional: Integrasi ke dalam rantai pasok global mendorong perusahaan untuk memenuhi standar kualitas internasional.
- (2) Persaingan sehat: Persaingan global mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- e. Pertumbuhan ekonomi inklusif
- (1) Penciptaan Lapangan Kerja: Integrasi rantai pasok seringkali menciptakan lapangan kerja baru, terutama di negara-negara berkembang.
- (2) Peningkatan Pendapatan: Peningkatan produksi dan ekspor dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Contoh:

- a. Industri elektronik: Produksi smartphone melibatkan berbagai negara, mulai dari pertambangan bahan baku hingga perakitan akhir. Integrasi rantai pasok ini memungkinkan produksi smartphone dengan biaya yang lebih efisien dan kualitas yang lebih tinggi.
- b. Industri Otomotif: Industri otomotif juga mengadopsi model produksi global, dengan komponen-komponen berasal dari berbagai negara.

## Tantangan dan pertimbangan

- a. **Vulnerabilitas:** Ketergantungan pada rantai pasok global dapat membuat suatu negara rentan terhadap gangguan global, seperti pandemi atau konflik geopolitik.
- b. **Ketimpangan:** Tidak semua negara dan kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama dari integrasi rantai pasok global.
- c. **Lingkungan:** Integrasi rantai pasok yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Globalisasi dan integrasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi dunia. Salah satu dampak positif yang paling nyata adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini terjadi:

### a. Peningkatan pendapatan

- (1) **Ekspansi pasar:** Perusahaan-perusahaan dapat mengakses pasar global yang lebih luas, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Ini berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan gaji karyawan dan menciptakan lapangan kerja baru.
- (2) **Investasi Asing Langsung:** Masuknya investasi asing langsung (FDI) seringkali disertai dengan transfer teknologi dan peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. Peningkatan kualitas hidup
- (1) Akses terhadap barang dan jasa: Globalisasi memperluas akses masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Ini mencakup makanan, pakaian, teknologi, dan layanan kesehatan.
  - (2) Peningkatan standar hidup: Dengan meningkatnya pendapatan dan akses terhadap berbagai produk, masyarakat dapat meningkatkan standar hidup mereka.
- c. Pengembangan sektor jasa
- Globalisasi mendorong pertumbuhan sektor jasa seperti pariwisata, keuangan, dan teknologi informasi. Sektor jasa ini seringkali menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.
- d. Pengurangan kemiskinan
- Pertumbuhan ekonomi inklusif: Globalisasi yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.
- e. Promosi demokrasi dan good governance
- Tekanan internasional: Globalisasi dapat meningkatkan tekanan internasional bagi negara-negara untuk menerapkan tata kelola yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh:

- a. Peningkatan kesejahteraan petani: Globalisasi membuka pasar ekspor bagi produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani dan mendorong adopsi teknologi pertanian yang lebih modern.
- b. Perkembangan industri manufaktur: Investasi asing langsung dalam industri manufaktur menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah industri.
- c. Pertumbuhan sektor pariwisata: Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Sektor ini menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang, seperti perhotelan, transportasi, dan kerajinan tangan.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak globalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu merata. Beberapa kelompok masyarakat mungkin lebih diuntungkan daripada yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### 7. Promosi demokrasi dan good governance

Globalisasi dan integrasi ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, namun juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem politik dan tata kelola suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak positifnya:

a. Tekanan internasional

- (1) Standar internasional: Negara-negara yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi global cenderung mengadopsi standar internasional terkait hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola yang baik. Hal ini dikarenakan negara-negara mitra dagang seringkali mensyaratkan adanya pemerintahan yang demokratis dan transparan.
- (2) Perjanjian internasional: Keikutsertaan dalam berbagai perjanjian internasional seperti WTO, ASEAN, atau Uni Eropa mengharuskan negara-negara anggota untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

b. Peningkatan transparansi

- (1) Akses informasi: Globalisasi mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, termasuk informasi mengenai kinerja pemerintah. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- (2) Media sosial: Media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kinerja pemerintah secara lebih efektif.

c. Penguatan masyarakat sipil

- (1) Jaringan global: Organisasi masyarakat sipil dapat terhubung dengan jaringan global, memperkuat advokasi mereka dan meningkatkan pengaruh mereka terhadap kebijakan pemerintah.

- (2) Donasi internasional: Organisasi masyarakat sipil dapat menerima dukungan finansial dari lembaga donor internasional untuk menjalankan program-program mereka.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat
- (1) Demokrasi elektoral: Globalisasi mendorong praktik demokrasi elektoral yang lebih baik, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil.
- (2) Partisipasi politik: Masyarakat menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilu maupun melalui kegiatan advokasi.
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- (1) Standar internasional: Negara-negara yang terintegrasi dalam ekonomi global cenderung lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia karena adanya tekanan dari komunitas internasional.
- (2) Mekanisme pengawasan: Adanya mekanisme pengawasan internasional seperti Universal Periodic Review (UPR) mendorong negara-negara untuk memperbaiki rekam jejak hak asasi manusia mereka.

Contoh:

- a. Negara-negara Asia Timur: Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura berhasil melakukan transisi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi yang juga memiliki perekonomian yang kuat. Integrasi mereka ke dalam

ekonomi global menjadi salah satu faktor yang mendorong proses demokratisasi ini.

- b. Negara-negara Eropa Timur: Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur melakukan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Integrasi ke dalam Uni Eropa mendorong mereka untuk menerapkan standar demokrasi dan tata kelola yang baik.

Namun, perlu diingat bahwa hubungan antara globalisasi, integrasi ekonomi, dan demokrasi tidak selalu linear. Terdapat juga kasus di mana globalisasi justru memperkuat kekuatan elit politik atau memicu ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting untuk melihat setiap kasus secara kontekstual dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi suatu negara.

Meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, namun juga memiliki sisi gelap yang perlu diperhatikan.

- a. Ketimpangan

- (1) Kesenjangan pendapatan: Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin di dalam suatu negara.
- (2) Eksploitasi tenaga kerja: Persaingan global dapat mendorong perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan upah rendah.

b. Kerentanan Ekonomi

(1) Krisis keuangan: Krisis ekonomi di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain melalui pasar keuangan global.

(2) Ketergantungan pada ekspor: Negara yang terlalu bergantung pada ekspor dapat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global.

c. Kerusakan lingkungan

Eksplorasi Sumber Daya Alam: Persaingan global dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menyebabkan kerusakan lingkungan.

d. Hilangnya keanekaragaman budaya

Dominasi Budaya Barat: Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya keunikan budaya lokal.

## **B. DIGITALISASI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Kedua konsep ini saling terkait erat dan mendorong transformasi mendalam dalam berbagai sektor.

### **Pengertian digitalisasi dan revolusi Industri 4.0**

- a. Digitalisasi: Proses peralihan dari analog ke digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan memproses informasi.

- b. Revolusi Industri 4.0: Merupakan tahap keempat revolusi industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan robotik menjadi ciri khas era ini.

**Dampak digitalisasi dan revolusi industri 4.0 terhadap Pembangunan Ekonomi adalah:**

- a. Efisiensi dan produktivitas
  - (1) Otomatisasi: Tugas-tugas yang berulang dapat diotomatisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
  - (2) Rantai pasok yang lebih baik: Teknologi digital memungkinkan pengelolaan rantai pasok yang lebih transparan dan efisien.
  - (3) Personalisasi: Perusahaan dapat mempersonalisasi produk dan layanan berdasarkan data pelanggan.
- b. Inovasi
  - (1) Produk dan layanan baru: Munculnya produk dan layanan baru yang didorong oleh teknologi digital.
  - (2) Model bisnis baru: Digitalisasi menciptakan model bisnis yang inovatif, seperti platform ekonomi dan ekonomi berbagi.
- c. Pertumbuhan Ekonomi
  - (1) Peningkatan PDB: Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.
  - (2) Penciptaan lapangan kerja baru: Meskipun ada kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, namun juga tercipta lapangan kerja baru di sektor teknologi.

d. Kesenjangan Digital

- (1) Akses yang tidak merata: Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, menciptakan kesenjangan digital.
- (2) Keterampilan: Persyaratan keterampilan tenaga kerja berubah, membutuhkan adaptasi yang cepat.

**Tantangan dan Peluang**

a. Tantangan

- (1) Keamanan siber: Ancaman siber semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya data yang terhubung secara digital.
- (2) Ketenagakerjaan: Otomatisasi dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang bersifat rutin.
- (3) Etika: Penggunaan teknologi digital menimbulkan pertanyaan etis, seperti privasi data dan bias algoritma.

b. Peluang

- (1) Pertumbuhan ekonomi inklusif: Digitalisasi dapat membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing di pasar global.
- (2) Solusi untuk masalah sosial: Teknologi digital dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

**Strategi untuk memanfaatkan potensi digitalisasi**

- a. Investasi dalam infrastruktur digital: Membangun jaringan internet yang kuat dan terjangkau.

- b. Pengembangan sumber daya manusia: Meningkatkan keterampilan digital masyarakat.
- c. Dukungan bagi UMKM: Membantu UMKM beradaptasi dengan era digital.
- d. Regulasi yang mendukung inovasi: Membuat kerangka regulasi yang jelas dan fleksibel untuk mendorong inovasi.
- e. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi: Membangun ekosistem inovasi yang kuat.

Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 adalah kekuatan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi modern. Meskipun menghadirkan tantangan, namun peluang yang ditawarkan sangat besar. Untuk dapat memanfaatkan potensi ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.

### **C. TRANSFORMASI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dimensi pembangunan berkelanjutan:

- a. Ekonomi: Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

- b. Sosial: Bertujuan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
- c. Lingkungan: Menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi polusi, dan mitigasi perubahan iklim.

Tantangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan:

- a. Pertumbuhan populasi: Peningkatan populasi dunia meningkatkan tekanan pada sumber daya alam.
- b. Perubahan iklim: Pemanasan global dan perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, air, dan ekosistem.
- c. Ketimpangan: Ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang semakin besar dapat menghambat pembangunan berkelanjutan.
- d. Urbanisasi: Urbanisasi yang cepat dapat menimbulkan masalah seperti polusi, kemacetan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar.

Strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

- a. Transisi ke ekonomi hijau: Mendorong investasi dalam energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau.
- b. Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan: Membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan efisien dalam penggunaan energi.
- c. Penguatan tata kelola: Menerapkan tata kelola yang baik dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

- d. Pendidikan dan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan memberikan pendidikan yang relevan.
- e. Kemitraan multi-stakeholder: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa contohnya adalah:

- a. Energi terbarukan: Teknologi seperti panel surya dan turbin angin memungkinkan produksi energi bersih.
- b. Pertanian cerdas: Penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian sambil mengurangi dampak lingkungan.
- c. Smart city: Kota pintar yang menggunakan teknologi untuk mengelola sumber daya secara efisien dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs mencakup berbagai isu, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga aksi iklim.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era modern, beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan: Memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah.

- b. Pengembangan infrastruktur digital: Membangun infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
- c. Fokus pada inovasi: Mendukung penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan menciptakan produk serta layanan baru.
- d. Transisi ke ekonomi hijau: Mendorong investasi dalam energi bersih dan teknologi ramah lingkungan.
- e. Memperkuat UMKM: UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. Kolaborasi multi-stakeholder: Melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). *Unbundling Institutions*. *Journal of Political Economy*, 113(5), 949-995.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Acharya, K. *et al.* (2023) 'Socioeconomic and education-based inequality in suspected developmental delays among Nepalese children: a subnational level assessment', *Scientific Reports*, 13(1), pp. 1-14. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-31629-1>.
- Ahmed, K. and Long, W. (2013) 'Climate change and trade policy: From legal complications to time factor', *Journal of International Trade Law and Policy*, 12(3), pp. 258-271. Available at: <https://doi.org/10.1108/JITLP-02-2013-0003>.
- Alba, Joseph D., dkk. (2009). The Impact of Exchange Rate on FDI and the Interdependence of FDI over Time. Working Paper. Asian Development Bank Economics.
- Andreoni, A. and Tregenna, F. (2020) 'Escaping the middle-income technology trap: A comparative analysis of industrial policies in China, Brazil and South Africa', *Structural Change and Economic Dynamics*, 54, pp. 324-340. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.05.008>.
- Andreoni, A. and Tregenna, F. (2021) 'The Middle-Income Trap and

- Premature Deindustrialization in South Africa', *Structural Transformation in South Africa*, pp. 237–260. Available at: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192894311.003.0011>.
- Arestis, P. (2015). Coordination of Fiscal with Monetary and Financial Stability Policies can better cure Unemployment. *Review of Keynesian Economics*, 3(2), 233-247.
- Asfaha, T.A. and Jooste, A. (2006) 'The agricultural input elasticity of rural-urban migration in South Africa', *Agrekon*, 45(1), pp. 89–105. Available at: <https://doi.org/10.1080/03031853.2006.9523736>.
- Au, A. (2023) 'Reassessing the econometric measurement of inequality and poverty: toward a cost-of-living approach', *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01738-3>.
- Azadi, H. and Vanhaute, E. (2019) 'Mutual effects of land distribution and economic development: Evidence from Asia, Africa, and Latin America', *Land*, 8(6), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.3390/LAND8060096>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) : <https://datarenbang.bappenas.go.id/>
- Badan Pusat Staistik (BPS), Tahun 2015-2022
- Bank Indonesia. (2009). "Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia", 41–68.

- Bank Indonesia. 2012. Laporan Perekonomian Indonesia. Menjaga Keseimbangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan. Jakarta.
- Bardhan, P. (2005). *Scarcity, Conflicts, and Cooperation: Essays in the Political Economy of Development*. MIT Press.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2003). *Economic Growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Blankenburg, S. (2004). *Institutions and Development: An Institutional Perspective on Economic Development*. *Development and Change*, 35(2), 261-285.
- Bongardt, A. and Torres, F. (2022) 'What have we learned and how is EU trade policy to cope with new challenges?', *Perspectivas - Journal of Political Science*, 27, pp. 148-157. Available at: <https://doi.org/10.21814/perspectivas.4567>.
- Borjas, G.J. (2020) *Labor Economic*, Mc Graw Hill Education.
- Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press.
- de Oliveira, B.F. and da Fonseca Nicolay, R.T. (2022) 'Does innovative capacity affect the deindustrialization process? A panel data analysis', *Journal of Economic Structures*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00292-6>.

- Destek, M.A. (2021) 'Deindustrialization, reindustrialization and environmental degradation: Evidence from ecological footprint of Turkey', *Journal of Cleaner Production*, 296, p. 126612. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126612>.
- Di Meglio, G. *et al.* (2018) 'Services in Developing Economies: The Deindustrialization Debate in Perspective', *Development and Change*, 49(6), pp. 1495–1525. Available at: <https://doi.org/10.1111/dech.12444>.
- Duflo, E., Kremer, M., & Robinson, J. (2011). *Nudging and Encouragement in Economics*. In *The Handbook of Organizational Economics*, Princeton University Press.
- Easterly, W. (2001). *The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. MIT Press.
- Eliasson, L.J. and Garcia-Duran, P. (2023) 'New is old? The EU's Open, Sustainable and Assertive Trade Policy', *Global Policy*, 14(S3), pp. 9–18. Available at: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13183>.
- Febriani, R. *et al.* (2021) 'Inflation, Unemployment, and Economic Growth: Implication on Poverty Level in Bengkulu Province', (January). Available at: <https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2020.2306624>.
- Feng, Y. and Wang, Y. (2021) 'The Impact of Deindustrialization on Economic Growth—Evidence from China', *International Business Research*, 14(5), p. 18. Available at: <https://doi.org/10.5539/ibr.v14n5p18>.
- Ferretti, F., Mariani, M. and Sarti, E. (2022) 'Patterns of

- Deindustrialization: Are Countries Converging?', *International Journal of Economics and Finance*, 14(10), p. 78. Available at: <https://doi.org/10.5539/ijef.v14n10p78>.
- Florennica, E. and Febriani, R.E. (2023) 'Do Financial Deepening, Government Spending, and Unemployment Benefit Poverty Reduction in Indonesia?', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), pp. 193–204. Available at: <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18610>.
- Garcia-Duran, P., Johan Eliasson, L. and Costa, O. (2023) 'Commerce and Security Meet in the European Union's Trade Defence Instruments', *Politics and Governance*, 11(4), pp. 165–176. Available at: <https://doi.org/10.17645/pag.v11i4.7030>.
- García-Vélez, D. and Nuñez Velázquez, J.J. (2021) 'A network analysis approach in multidimensional poverty', *Poverty and Public Policy*, 13(1), pp. 59–68. Available at: <https://doi.org/10.1002/pop4.302>.
- Garton, K., Swinburn, B. and Thow, A.M. (2022) 'The interface between international trade and investment agreements and food environment policymaking: A conceptual framework', *Frontiers in Political Science*, 4(996017), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.996017>.
- Glaeser, E. L., & Scheinkman, J. A. (2003). *The Economic Approach to Cities*. In *Handbook of Economic Growth*, Volume 1, Elsevier.
- Graña, J.M. and Terranova, L. (2022) 'Neither mechanical nor premature: deindustrialization and the New International

Division of Labour (1970-2019)', *Revista de Historia Industrial*, 31(86), pp. 11-46. Available at: <https://doi.org/10.1344/rhiihr.36591>.

Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). *Transitions to sustainable development: new directions in the study of long term transformative change*. Routledge.

Hajiyeva, A. *et al.* (2024) 'Technological innovations in agriculture: Impact on production efficiency', *Scientific Horizons*, 27(1), pp. 172-182. Available at: <https://doi.org/10.48077/scihor1.2024.172>.

Harris, J. M., & Roach, B. (2003). *Sustainable Economic Development: A Critical Approach*. *The Ecologist*, 33(5), 42-48.

Hasan, M., et al. (2022). *EKONOMI PEMBANGUNAN: Sebuah tinjauan teori dan praktis* (R. Septiani, Ed.). CV Widina Media Utama.

Hausmann, R., Rodrik, D., & Velasco, A. (2005). *Growth Diagnostics*. In *The Economic Growth of the Developing World*, MIT Press.

Jhingan, M. L. (2012). *The Economics of Development and Planning*. Vrinda Publisher

Juliana, I., Safitri, N. L., & Fadillah, W. (2023). *Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan*. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.436>

Kaur, J. *et al.* (2022) 'Protecting farmers' data privacy and confidentiality: Recommendations and considerations', *Frontiers*

- in Sustainable Food Systems*, 6(903230), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.903230>.
- Khan, S.A., Shakoor, A. and Ali, A. (2020) ‘The Politics of Land Redistribution and its Implications for the Effectiveness of Land Reform Programmes: Evidence from South Africa and Zimbabwe’, *Sjesr*, 2(2), pp. 110–124. Available at: [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol2-iss2-2019\(110-124\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol2-iss2-2019(110-124)).
- Klenow, P. J., & Rodriguez-Clare, A. (2005). *Externalities and Growth*. In *Handbook of Economic Growth*, Volume 1, Elsevier.
- Kollmeyer, C. (2018) ‘Trade union decline, deindustrialization, and rising income inequality in the United States, 1947 to 2015’, *Research in Social Stratification and Mobility*, 57, pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.07.002>.
- Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M., (2021), *International Economics: Theory and Policy*, 12 Edition, Pearson
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Lampón, J. *et al.* (2022) ‘The New Mobility Technologies and the Reconfiguration of Automotive Value Chain: Consequences for the Automotive Industry and Society’, *SSRN Electronic Journal* [Preprint], (October). Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.4239579>.
- Laporan Bank Dunia (World Bank) tentang Infrastruktur di Indonesia: <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia>

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, PUPR,  
Tahun 2022

Lewis, W. A. (1955). *The theory of economic growth*. Routledge.

Lucas, R. E. (1988). *On the Mechanics of Economic Development*.  
*Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). *A Contribution to the  
Empirics of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics*,  
107(2), 407-437.

Morceiro, P.C. and Guilhoto, J.J.M. (2023) 'Sectoral deindustrialization  
and long-run stagnation of Brazilian manufacturing', *Brazilian  
Journal of Political Economy*, 43(2), pp. 418-441. Available at:  
<https://doi.org/10.1590/0101-31572023-3340>.

Narayan, D. *et al.* (2000) 'Can anyone hear us? Voices from 47  
Countries', *World Bank*, I(December), pp. 1-277. Available at:  
[http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-1952-1601-  
6](http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-1952-1601-6).

Nazeer, N. and Rasiah, R. (2016) 'Explaining Pakistan's Premature  
Deindustrialization', *the Lahore Journal of Economics*, 21(Special  
Edition), pp. 351-368. Available at:  
<https://doi.org/10.35536/lje.2016.v21.isp.a15>.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic  
Performance*. Cambridge University Press.

Nweke, A.C. (2019) 'Investigating Rural - Urban Migration in  
Developing Countries of the World a Focus in Nigeria', *Journal of  
Public Policy and Administration*, 3(3), p. 76. Available at:

<https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20190303.12>.

- Oluwagbade, E. O., & Ibidapo, C. O. K. (2024). Impact of Globalization on the Economic Development of Nigeria. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 12(1), 26-51.
- Owusu, T.Y. (2014) 'Economic Transition in the City of Paterson, New Jersey (America's First Planned Industrial City): Causes, Impacts, and Urban Policy Implications', *Urban Studies Research*, 2014, pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1155/2014/672794>.
- Pangestuty, F. W., & Prasetyia, F. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Perry Warjiyo, 2017. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Strudi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Pritchett, L. (1997). *Divergence, Big Time*. *The Journal of Economic Perspectives*, 11(3), 3-17.
- Priyono, F.J. (2023) 'Trade and Decarbonization: Opportunities and Challenges', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012003>.
- Purmini, P. and Rambe, R.A. (2021) 'Labor and Government Policies on Poverty Reduction in Sumatera Island, Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), pp. 61–74. Available at: <https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13775>.
- Pushkar, P. and Badoni, R. (2023) 'The Intersection of Trade Law and Environmental Policy: Conflicts and Synergies', *Interdisciplinary*

*Studies in Society, Law, and Politics*, 2(3), pp. 27–36. Available at:  
<https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.3.4>.

Rambe, R.A. *et al.* (2023) 'Examining the roles of labor factors, investment, and industrialization in poverty alleviation: Empirical evidence from Sumatra, Indonesia', *Poverty and Public Policy*, 15(4), pp. 431–446. Available at:  
<https://doi.org/10.1002/pop4.385>.

Rambe, R.A., Purmini, P. and Anitasari, M. (2023) 'Probability of Getting Households Out of Poverty: Empirical Studies in Indonesia', *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 31(2), pp. 397–416. Available at:  
<https://doi.org/10.31436/ijema.v31i2.1103>.

Ridwan, M. (2022) 'Fishermen's poverty reduction based on integrated marketing system', *AMCA Journal of Community Development*, 2(1), pp. 22–30. Available at:  
<https://doi.org/10.51773/ajcd.v2i1.123>.

Rodrik, D. (2003). *Growth Strategies*. In *Handbook of Economic Growth*, Volume 1, Elsevier.

Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.

Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.

Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six transformations to achieve the

- sustainable development goals. *Nature sustainability*, 2(9), 805-814.
- Sahban, M. A. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. SAH MEDIA.
- Salvadore, Domonick, 2007. Globvalization, Growth and Poverty, *Global Economy Jurnal*, February 2007
- Salvatore, D., (2020), *International Economics*, 13<sup>th</sup> edition. Wiley
- Salvatore, Dominick. 2003. *International Trade and Economic Development, Institutions and Economic Development*, Fall 2003, pp. 5-26
- Selelo, M.E., Mokoele, N.J. and Mnisi, P.T. (2023) 'Repatriation of the Brain Drain to Brain Gain Dichotomy from Urban Areas to Rural Areas: Decentralizing Development', *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(6), pp. 1755-1766. Available at: <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i6.739>.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Setiawan, Heri dan Lestari, Sari. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Subandi. (2019). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Alfabeta.
- Surata, I.G. and Sena, I.G.A.W. (2022) 'The Effectiveness of Decree of The Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as The Holder

of Land Rights', *International Journal of Social Science and Business*, 6(4), pp. 621–632. Available at: <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51013>.

Tambunan, T. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian teoritis dan analisis empiris*. Ghalia Indonesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *ECONOMIC DEVELOPMENT* (9th ed.). Pearson Education Limited.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.

Tole, L. (2004) 'A quantitative investigation of the population-land inequality-land clearance nexus', *Population and Environment*, 26(2), pp. 75–106. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11111-004-0836-y>.

Toth, M., Rabek, T. and Strapekova, Z. (2020) 'Impact of Integration and Globalization on Business Risk and loans in Slovak Agriculture', *SHS Web of Conferences*, 74, p. 05027. Available at: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207405027>.

Tumwesigye, S. *et al.* (2021) 'Who and Why? Understanding Rural Out-Migration in Uganda', *Geographies*, 1(2), pp. 104–123. Available at: <https://doi.org/10.3390/geographies1020007>.

Wan, X., Ajaz Kazmi, S.A. and Yeewong, C. (2022) 'Manufacturing, Exports, and Sustainable Growth: Evidence from Developing Countries', *Sustainability (Switzerland)*, 14(3), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.3390/su14031646>.

Weiß, W. (2023) 'The EU's strategic autonomy in times of

politicisation of international trade: The future of commission accountability', *Global Policy*, 14(S3), pp. 54–64. Available at: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13147>.

Wibowo, K. (2023). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Kerangka Teoritis dan Aplikasinya*. Universitas Terbuka.

Widianingsih, E. (2023). Transformasi Ekonomi Hijau: Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Modern. *Central Publisher*, 1(9), 1089-1095.

World Bank, 2023. The Impact of Infrastructure on Development Outcomes. Policy Research Working Paper 10350

World Bank. (1991). *The Challenge of Development: The World Bank's Perspective*. World Bank.

Zhang, S. *et al.* (2020) 'Has rural migration weakened agricultural cultivation? Evidence from the mountains of Southwest China', *Agriculture (Switzerland)*, 10(3). Available at: <https://doi.org/10.3390/agriculture10030063>.

Zulkifli, F. and Abidin, R.Z. (2023) 'The Multi-Dimensional Nature of Poverty: A Review of Contemporary Research', *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 12(2), pp. 285–303. Available at: <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i2/17260>.

## BIOGRAFI PENULIS



### **Dr. Nurhayati, SE, ME.**

Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti.

Pengalaman mengajar Statistika, Ekonometrika dan Praktikum Alat Analisis Kuantitatif. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai pengurus Jurnal sebagai Managing Editor pada Jurnal Media Ekonomi. Penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengolahan Data dan Statistik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.



### **Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.**

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda, . Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di

wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan

Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang.



**Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc.**

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan Program Magister-S2 pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai dosen, juga aktif sebagai tenaga ahli pada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dan juga sebagai asesor kompetensi BNSP. Selain itu, aktif juga sebagai pengurus ISEI Cabang Bengkulu dan melakukan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran publikasi ilmiah pada Jurnal internasional bereputasi (Scopus) & Jurnal Nasional terindeks Sinta. Penulis juga memiliki beberapa karya tulis berupa buku ajar dan buku referensi terkait Ilmu Ekonomi.



Scopus.ID: 57761739400



ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Ratu-Febriani>



ORCID.ID: <https://orcid.org/0000-0003-4449-9862>



googlescholar:  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=AKymqSwAAAAJ&hl=id>



SintaID: 6756979

E-mail: [ratuevafebriani@unib.ac.id](mailto:ratuevafebriani@unib.ac.id)



**Dr. Agustina Suparyati, SE, ME.**

Seorang penulis, peneliti, Jurnalis dan Dosen pada Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Sleman, Yogyakarta, 1 Agustus 1967. Menamatkan jenjang pendidikan Program Sarjana Srata 1 di Universitas Gadjah Mada, Program Pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia dan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Padjajaran Bandung. Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Editor in Chief di Jurnal Media Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis telah menyusun berbagai buku ajar, book chapter dan artikel yang dipublikasikan jurnal nasional maupun internasional.



**Sri Yani Kusumastuti, S.E., M.Si.**

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pengalaman mengajar Mikroekonomika, Statistika, Ekonometrika, Metodologi Penelitian, Ekonomi Digital, dan Analisa Big Data. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan, Menjadi Editor di beberapa buku, antara lain: *Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis: suatu kajian empiris (2002)*, *Desain eksperimental: aplikasi dalam riset ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi (2011)*. Penulis buku *Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (2018)*, penulis berbagai buku ajar dan buku referensi, dan artikel ilmiah di berbagai jurnal.

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi  
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik  
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

**SONPEDIA.COM**  
**PT. Sonpedia Publishing Indonesia**

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)